



BAPELITBANGDA

LP2KD TAHUN 2022

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

**KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA**



**Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 ini penyusunannya dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan LP2KD ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. LP2KD Tahun 2022 ini memuat laporan tentang kondisi kemiskinan, upaya yang sudah dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan serta kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya berlandaskan kepada semangat kolaborasi dan konvergensi. Dengan semangat kolaborasi dan konvergensi target penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan baik dan berkelanjutan.

Rekam jejak upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya yang dituangkan dalam LP2KD Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran penting bagi TKPK Kabupaten Sumba Barat Daya dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan target peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumba Barat Daya.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam memberikan data serta masukan perbaikan. karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada Tim Penyusun buku ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kami mohon maaf dan mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kemajuan daerah kita Sumba Barat Daya Loda Wee Maringi Pada Wee Malala.

Tambolaka, 23 November 2022
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya.

Samuel Boro, ST



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I – PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II – PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.....	8
2.1 Kondisi Umum Daerah	8
2.1.1 Geografis	8
2.1.2 Topografi.....	10
2.1.3 Klimatologi	11
2.1.4 Demografi	12
2.2 Kondisi Kemiskinan Multidimensi	13
2.2.1 Dimensi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	13
2.2.2 Dimensi Kesehatan	23
2.2.3 Dimensi Pendidikan	29
2.2.4 Dimensi Prasarana Dasar	37
2.2.5 Dimensi Ketahanan Pangan.....	42
BAB III – KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	48
3.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	48
3.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan	56



BAB IV – KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	63
4.1 Kelembagaan TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya.....	63
4.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	68
4.2.1 Koordinasi di Tingkat Daerah	69
4.2.2 Koordinasi di Tingkat Pusat.....	70
4.2.3 Rapat Koordinasi TKPKD Tingkat Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya	70
4.3 Permasalahan Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan	75
BAB V – KESIMPULAN	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Barat Daya	8
Tabel 2.2 Tinggi Rata-rata Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan	11
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021	12
Tabel 2.4 Data perkembangan penduduk miskin tahun 2017 – 2021 Kabupaten Sumba Barat Daya.....	14
Tabel 2.5 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 - 2021	24
Tabel 2.6 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 - 2021	26
Tabel 2.7 Cakupan Kasus Balita Glzi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat DayaTahun 2018-2021.....	27
Tabel 2.8 Rasio Rumah Sakit, Dokter dan Rasio Tenaga Paramedis Di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018-2021.....	27
Tabel 2.9 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan	28
Tabel 2.10 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang melek huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2021	30
Tabel 2.11 Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2021	33
Tabel 2.12 Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2021	34
Tabel 2.13 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2021	43



Tabel 2.14 Rata-Rata Harga Bahan Pangan Pokok di Kabupaten Sumba Barat Daya 2021	44
Tabel 2.15 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2021	46
Tabel 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019 – 2024	48
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Daerah Tahun 2021	52
Tabel 3.3 Rincian Program Unggulan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021	54
Tabel 3.4 Penerima Bantuan Sosial	58
Tabel 4.1 Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu	66
Tabel 4.5 Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	67
Tabel 4.6 Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta administrasi Kabupaten Sumba Barat Daya	9
Gambar 2.2 Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SD/MI	35
Gambar 2.3 Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SMP/MTs.....	36
Gambar 2.4 Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SMA/SMK.....	36
Gambar 2.5 Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Prasarana Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya	41
Gambar 2.6 Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Listrik di Kabupaten Sumba Barat Daya.....	41
Gambar 2.7 Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi TKPKD	63



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
Grafik 1.2 Kontribusi per Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Sumba Barat Daya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3
Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 – 2021	15
Grafik 2.2 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021	15
Grafik 2.3 Efektivitas Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Tahun 2017-2021	17
Grafik. 2.4 Perkembangan antar waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014-2021	18
Grafik 2.5 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Sumba Barat Daya	19
Grafik 2.6 Perkembangan antar waktu Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014 – 2021	20
Grafik 2.7 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021	21
Grafik 2.8 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Kabupaten Sumba Barat Daya	22
Grafik 2.9 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021	22
Grafik 2.10 Persentase Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 – 2021	31



Grafik 2.11 Persentase Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 – 2021	32
Grafik 2.12 Perkembangan Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak Di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 – 2021	37
Grafik 2.13 Perkembangan Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak Di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 – 2021	38
Grafik 2.14 Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021	39
Grafik 2.13 Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 – 2021	40



BAB I

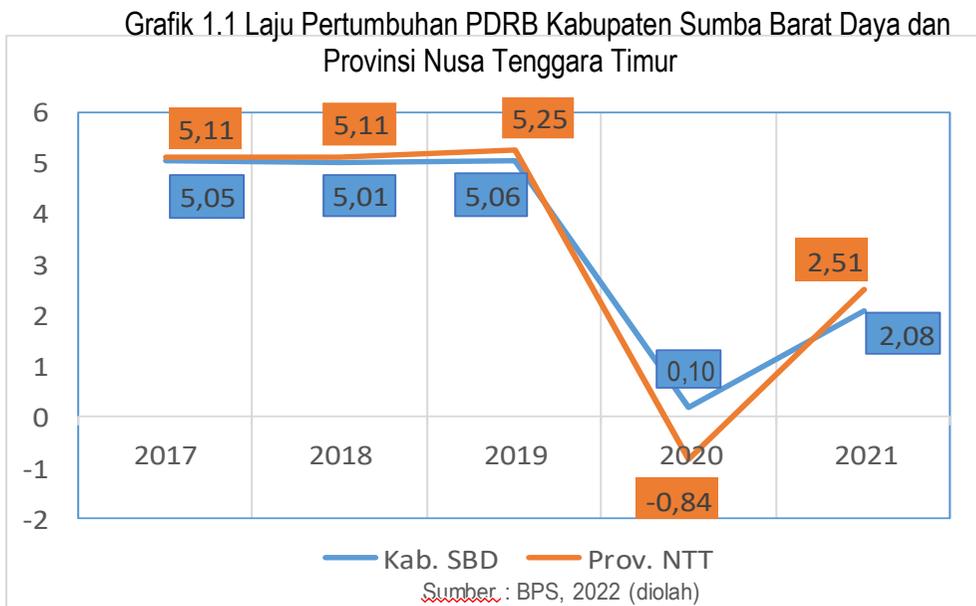
PENDAHULUAN



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2021 masih dibayangi oleh bayangan gelap ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Selain menelan korban jiwa, pandemi Covid-19 juga membawa dampak pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya tanpa terkecuali di Kabupaten Sumba Barat Daya. Walau demikian, perlahan tapi pasti bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19 adalah keniscayaan sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Hasilnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami kenaikan 1,98 poin menjadi 2,08 % dibanding tahun 2020 sebesar 0,10 % sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 mengalami kenaikan 3,35 poin menjadi 2,51 % dibanding tahun 2020 sebesar -0,84% (lihat grafik 1.1).



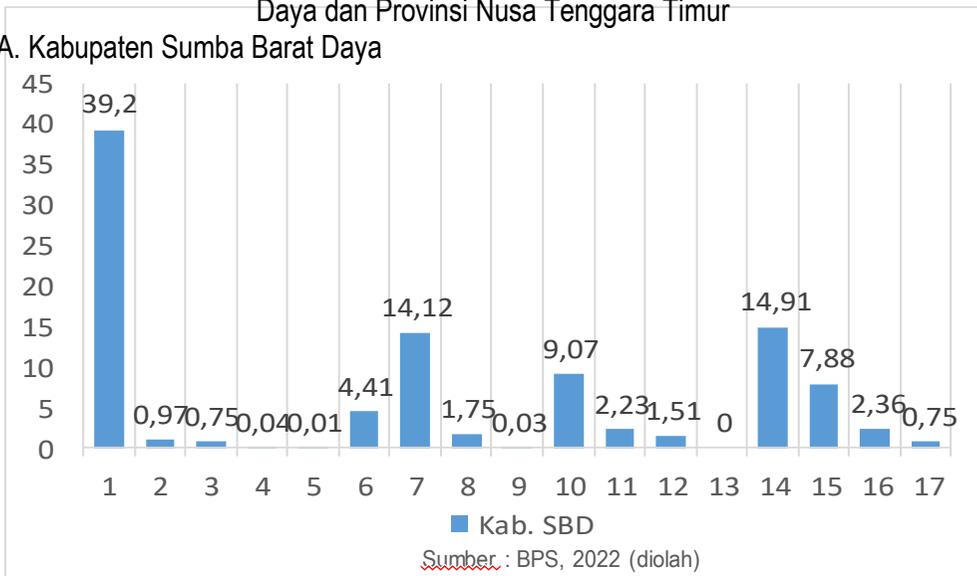
Dengan pertumbuhan yang positif ini, besaran kontribusi per sektor usaha pada tahun 2021 tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya baik di Kabupaten Sumba Barat Daya maupun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 adalah dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan persentase sebesar 39,20. Berikutnya adalah dari Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan persentase sebesar 14,91; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberi sumbangan 14,12 persen terhadap PDRB ADHB (lihat grafik 1.2 A) sementara



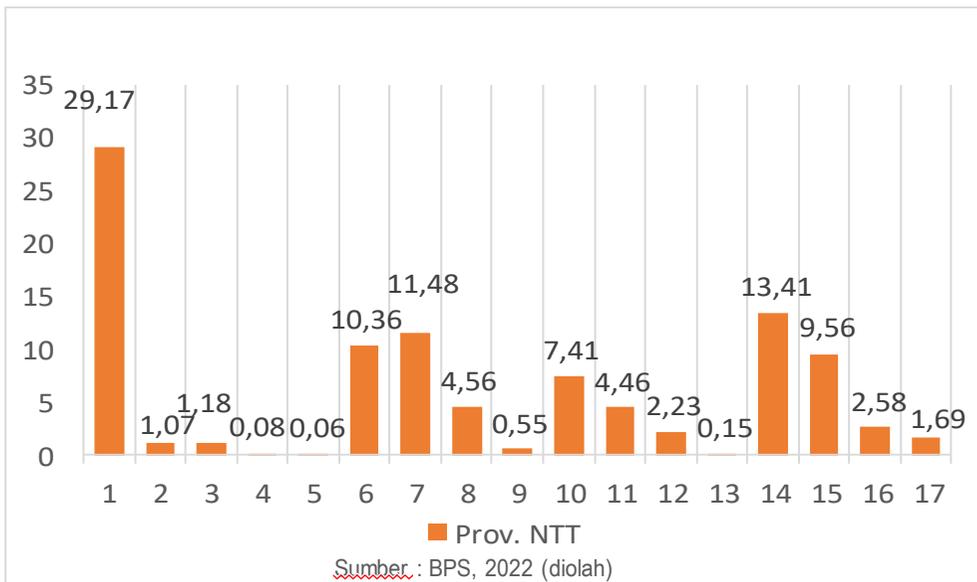
Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi NTT tahun 2021 adalah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan 29,17 persen. Berikutnya adalah dari lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan 13,41 persen, dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 11,48 persen (lihat grafik 1.2 B).

Grafik 1.2 Kontribusi per Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Sumba Barat Daya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. Kabupaten Sumba Barat Daya



B. Provinsi Nusa Tenggara Timur





*Keterangan Lapangan Usaha :

- | | |
|--|--|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 10. Informasi dan komunikasi |
| 3. Industri Pengolahan | 11. Jasa keuangan dan asuransi |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 12. Real estate |
| 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 13. Jasa perusahaan |
| 6. Konstruksi | 14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib |
| 7. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor | 15. Jasa pendidikan |
| 8. Transportasi dan pergudangan | 16. Jasa kesehatan dan kegiatan social |
| | 17. Jasa lainnya |

Lesunya perekonomian di Kabupaten Sumba Barat Daya berdampak pada melambatnya proses pembangunan yang ujung-ujungnya menambah daftar nama-nama baru penduduk miskin. Data presentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 yaitu 28,18% (BPS, 2022) termasuk tinggi karena masih berada di atas rata-rata Provinsi NTT sebesar 20,44% (BPS, 2022) dan di atas rata-rata nasional sebesar 10,06% (BPS, 2022). Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 sebanyak 100,42 (ribu jiwa) bertambah 2,61(ribu jiwa) dibanding tahun 2020 sebanyak 97,81 (ribu jiwa).

Tahun 2021, merupakan titik balik bagi Kabupaten Sumba Barat Daya dalam merefleksikan kembali berbagai kebijakan pembangunan yang telah diselenggarakan, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) tahun 2022 ini merupakan laporan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sajian dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi batu pijakan bagi lintas pemangku kepentingan dalam menentukan langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih baik pada tahun yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menjelaskan perkembangan pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu, penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022 bertujuan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja TKPK Kabupaten Sumba Barat Daya, memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan berdasarkan karakteristik indikator kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya, memberikan gambaran tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, menjelaskan kinerja TKPK dalam menjalankan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya,



dan menjelaskan upaya pencapaian Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melakukan penanggulangan kemiskinan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum bagi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;
- 2) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 6) Undang-Undang No 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 9) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- 10) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten / Kota;
- 12) Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 131/KEP/HK/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2022.



1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) terdiri atas 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Topografi
- 2.3. Klimatologi
- 2.4. Demografi
- 2.5. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
- 2.6. Kondisi Kemiskinan Multi Dimensi
- 2.7. Dimensi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
- 2.8. Dimensi Kesehatan
- 2.9. Dimensi Pendidikan
- 2.10. Dimensi Prasarana Dasar
- 2.11. Dimensi Ketahanan Pangan

BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

- 3.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- 3.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan
- 3.3 Program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

BAB IV KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 4.1 Kelembagaan TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya
- 4.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- 4.3 Permasalahan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi

BAB II

KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



2. PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Geografis

Kabupaten Sumba Barat Daya adalah salah satu Kabupaten dari 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Sumba dan 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Sumba
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Sumba Barat
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Secara astronomis wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terletak antara koordinat 99,18'-109,20' LS (Lintang Selatan) dan 1189,55'-1209, 23' BT (Bujur Timur). Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.445,32 km² meliputi 11(sebelas) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 173 desa dan 2 kelurahan.

Kecamatan-kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Utara, Kodi Balaghar, Wewewa Utara, Wewewa Selatan, Wewewa Timur, Wewewa Barat, Wewewa Tengah, Laura dan Kota Tambolaka. Luas Wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah		Luas Wilayah (KM ²)	Persentase Luas (%)
			Kelurahan	Desa		
1.	Kodi Bangedo	Walla Ndimu	-	15	73.22	5.07
2.	Kodi Balaghar	Panengo Ede	-	14	146.47	10.01
3.	Kodi	Kodi	-	19	111.86	7.74
4.	Kodi Utara	Kori	-	21	243.82	16.87
5.	Wewewa Selatan	Manola	-	14	174.14	12.05
6.	Wewewa Barat	Waimangura	-	20	147.34	10.19



No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah		Luas	Persentase
7.	Wewewa Timur	Elopada	-	19	139.88	9.68
8.	Wewewa Tengah	Ndapa Taka	-	20	109.67	7.59
9.	Wewewa Utara	Palla	-	12	63.26	4.38
10.	Loura	Karuni	-	11	138.51	9.58
11.	Kota Tambolaka	Tambolaka	2	8	98.95	6.85
	Jumlah		2	173	1,445.32	100.00

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya pada Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

Dari tabel 2.1 diatas terlihat bahwa Kecamatan Kodi Utara memiliki luas wilayah paling besar yakni 243.82 km² atau 16,87% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya urutan kedua adalah Kecamatan Wewewa Selatan yakni 174,14 km² atau 12,05% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, sedangkan Kecamatan yang memiliki luas terkecil yakni Kecamatan Wewewa Utara dengan luas wilayah 63,26 km atau 4,38% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Peta administrasi Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta administrasi Kabupaten Sumba Barat Daya



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020-2040



2.1.2 Topografi

Meizer dan Pfeiffer (1964) membagi dataran Sumba dalam 7 jenis topografi, karena pembagiannya sangat sulit diamati maka untuk mempermudah pengamatan pembagian wilayah topografi dibuat dalam 5 kelompok sebagai berikut:

1. Wilayah gunung ditandai dengan kemiringan yang tinggi, wilayah ini meliputi Gunung Tanadaro.
2. Wilayah perbukitan ditandai dengan kemiringan yang lebih rendah dari wilayah gunung.
3. Wilayah undukan dekat laut ditandai undukan dan jurang yang curam sepanjang pantai selatan.
4. Wilayah datar yang cukup luas dan dikelilingi bukit seperti dataran Anakalang.
5. Wilayah dataran aluvial ditandai oleh dataran yang agak sempit sekitar sungai.
6. Keadaan kemiringan lahan di Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari lahan datar hingga berbukit dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 10 hingga 850 MSL (diatas permukaan laut), sedangkan topografi kawasan sepanjang pantai relatif datar.

Kondisi topografi inipun berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya, karena pada daerah pegunungan dan perbukitan mempunyai kontur wilayah yang sangat rawan terhadap longsor dengan akses jalan yang sangat sulit yaitu jalan yang kecil, berlubang dengan kelokan yang sangat tajam sehingga mempersulit mengakses dari desa satu ke desa yang lain. Pada daerah pegunungan dan perbukitan juga dapat jadi keterasingan/keterpencilan karena berada pada lingkungan yang buruk yaitu warga masyarakat yang berdomisili didaerah ini sulit terjangkau dan terpencar-pencar, hal ini menyebabkan daerah tersebut sulit untuk membuka diri dan beradaptasi dengan dunia luar.

Potensi sumber daya alam baik di darat maupun di laut cukup tersedia. Dalam kaitan ini kawasan hutan pada kurun waktu tiga (3) Tahun terakhir tersisa sekitar 24% dari total luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, dari yang telah ditetapkan 30% luas hutan dari luas wilayah, kondisi ini memperlihatkan proses penciutan luas hutan sangat tajam. Kemerosotan luas hutan terutama disebabkan oleh pembakaran hutan yang tidak terkendali, peladangan berpindah-pindah yang tidak terkendali, dan penebangan secara besar-besaran atas berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomi tinggi. Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sepanjang pantai relatif datar. Tinggi rata-rata wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya menurut kecamatan terlihat pada tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2
Tinggi Rata-rata Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya
Dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (M)
1.	Kodi Bangedo	0-300
2.	Kodi Balaghar	0-300
3.	Kodi	0-300
4.	Kodi Utara	0-300
5.	Wewewa Selatan	300-500
6.	Wewewa Barat	300-750
7.	Wewewa Timur	300-850
8.	Wewewa Tengah	300-850
9.	Wewewa Utara	100-600
10.	Loura	0-300
11.	Kota Tambolaka	0-300

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya pada Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

Dari tabel 2.2 di atas kecamatan Wewewa Timur dan Wewewa Tengah tinggi rata-rata dari permukaan laut sebesar 300-850 meter. Kondisi ini menunjukkan bahwa dua wilayah kecamatan tersebut memiliki tinggi rata-rata dari permukaan laut lebih tinggi dari wilayah kecamatan lainnya.

2.1.3 Klimatologi

Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun, setelah melewati masa peralihan pada Bulan April-Mei dan Oktober-November. Walaupun demikian, mengingat Kabupaten Sumba Barat Daya dan pada umumnya Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dekat dengan Australia, mengakibatkan arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga sampai di Wilayah



Sumba Barat Daya kandungan uap airnya sudah berkurang, hal ini mengakibatkan hari hujan di Kabupaten Sumba Barat Daya lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Sumba Barat Daya sebagai wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 bulan (Januari sampai dengan Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering. Dengan keadaan Kabupaten Sumba Barat Daya yang hanya 4 bulan relatif basah dan 8 bulan relatif kering ini dapat mengakibatkan kekeringan pada lahan pertanian, hama penyakit pada tanaman pertanian dan gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan dan bertambahnya penduduk miskin.

2.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya hasil sensus penduduk tahun 2021 adalah sebesar 305.689 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 156.725 jiwa dan perempuan sebanyak 148.964 jiwa. Penduduk dengan kelompok umur 5 – 9 tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu 42.152 ribu jiwa sedangkan penduduk dengan kelompok umur 75 + memiliki jumlah paling sedikit yaitu 2.427 ribu jiwa (selengkapnya lihat tabel 2.3)

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021

Golongan Umur	Jumlah Penduduk (Ribu)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	21.329	19.987	41.316
5 – 9	21.520	20.632	42.152
10 – 14	18.635	16.949	35.584
15 – 19	14.211	13.271	27.482
20 – 24	14.170	13.569	27.739
25 – 29	11.688	11.358	23.046
30 – 34	10.874	10.623	21.497
35 – 39	9.219	8.958	18.177
40 – 44	8.507	8.462	16.969



45 – 49	7.567	7.201	14.768
50 – 54	5.868	5.683	11.551
55 – 59	4.570	4.238	8.808
60 – 64	3.285	3.188	6.473
65 – 69	2.417	2.281	4.698
70 – 75	1.525	1.477	3.002
75 +	1.340	1.087	2.427
Jumlah	156.725	148.964	305.689

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

2.2 Kondisi Kemiskinan Multidimensi

Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang dialami oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karenanya kemiskinan adalah suatu kondisi yang memiliki dimensi kompleks dengan berbagai karakteristik sesuai potensi geografis wilayah/daerah dan sosiologisnya. Dengan demikian kondisi kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi harus dapat dijelaskan berdasarkan analisis terhadap capaian indikator hasil pembangunan secara keseluruhan terutama yang meliputi dimensi-dimensi yang secara representatif dapat menggambarkan kondisi kemiskinan di daerah antara lain dimensi kemiskinan dan ketenagakerjaan, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi idang infrastruktur dasar dan dimensi ketahanan pangan.

2.2.1 Dimensi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Tolak ukur/indikator keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan meliputi 4 (empat) indikator utama yaitu Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Tingkat Pengangguran. Data perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:



Tabel 2.4.
Data perkembangan penduduk miskin tahun 2017 – 2021
Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase (%)	Garis Kemiskinan
1.	2017	331.894	99.540	30,13	338.742
2.	2018	338.427	97.280	28,88	350.906
3.	2019	344.720	96.300	28,06	355.252
4.	2020	303.650	97.810	28	383.674
5.	2021	305.689	100.420	28,18	390.217

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

Data jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan menggunakan data dari BPS tadi diharapkan diperoleh data yang lebih valid untuk mengurangi kerancuan sebagai bahan analisis karena tidak jarang antara perencanaan pusat dan daerah dalam implementasi kegiatan dilapangan memunculkan sasaran berbeda yang menyebabkan terjadi permasalahan dan kecemburuan sosial dimasyarakat.

2.2.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0)

Tingkat kemiskinan (P0) ditunjukkan dengan jumlah (Jiwa) dan persentase (%) penduduk miskin sebagai berikut :

➤ Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan

Perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 2017 sampai dengan 2019 berdasarkan data BPS terjadi penurunan secara bertahap akan tetapi terjadi peningkatan di tahun 2020 dan 2021.

Peningkatan dalam 2 (dua) periode tahun tersebut lebih disebabkan karena adanya pandemi virus covid-19 yang melanda Kabupaten Sumba Barat Daya dimana terjadi pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan roda perekonomian tidak berjalan dengan baik dan kenaikan harga BBM yang memicu inflasi dan penurunan daya beli. Walau demikian, perkembangan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk tidak selalu diikuti peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan karena adanya upaya-upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin.



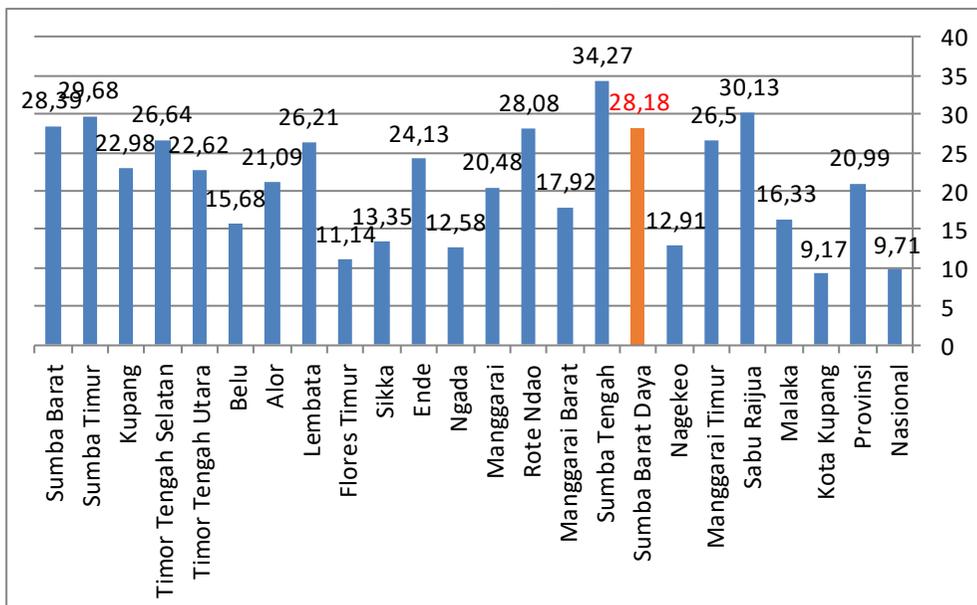
Grafik 2.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2017 – 2021



Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

➤ Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan

Grafik 2.2 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022



Posisi relatif ini menunjukkan perbandingan pencapaian indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Kabupaten lain di Propinsi Nusa Tenggara Timur, apakah Kabupaten Sumba Barat Daya berada pada posisi lebih baik dari pada rata-rata Propinsi Nusa Tenggara Timur/Kabupaten lain atau sebaliknya. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Sumba Barat Daya pada grafik 2.3 di atas, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya secara persentase berada di atas rata-rata angka tingkat kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,99% bersama-sama dengan 13 (tiga belas) kabupaten lain yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu.

Posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 mengalami perubahan yang kurang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Secara persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif/naik-turun, pada tahun 2021 menduduki peringkat ke 18 dari 21 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Kabupaten Sumba Barat Daya memerlukan upaya extra untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi.

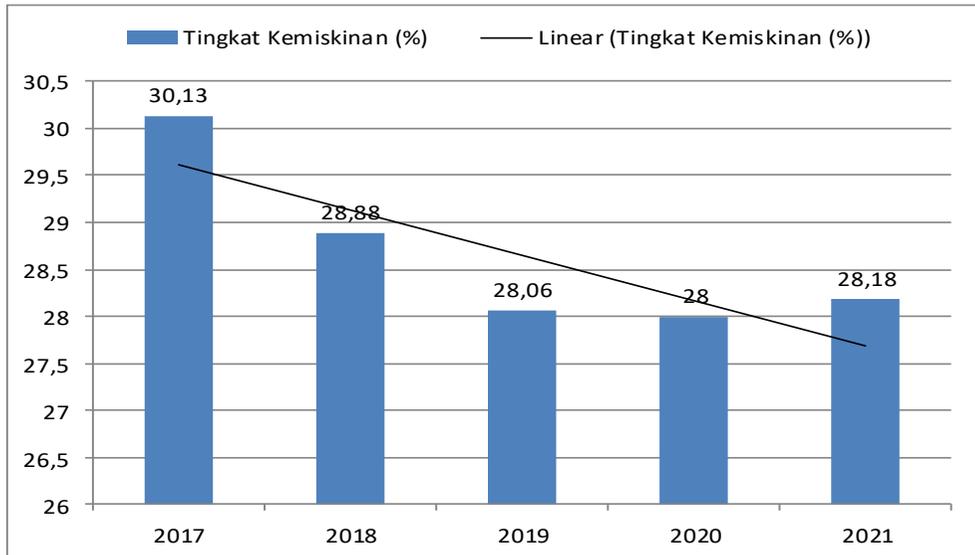
➤ Efektifitas Program

Pada grafik 2.3 berikut, terlihat bahwa efektifitas penurunan tingkat kemiskinan dari angka 30,13% pada tahun 2017 menjadi 28,18% tahun 2021. Secara keseluruhan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih kurang efektif sehingga diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan program-program pengentasan kemiskinan. Permasalahan efektifitas penurunan tingkat kemiskinan perlu dilihat terutama dari segi kebijakan/program yang dilaksanakan selama ini sepertinya perlu penajaman yang dimulai dengan melakukan analisis kondisi kemiskinan secara tepat sehingga program pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran dan lebih efektif.

Agar dapat dilakukan analisis secara tepat harus dimulai dari pendataan KK miskin yang didasari koordinasi dan kesatuan pemahaman dari stakeholder tentang KK miskin lalu dilakukan pengelompokan dan pengolahan data KK miskin sesuai kriteria/klaster yang sama agar dapat dilakukan program yang tepat. Setiap program yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan berbeda, tergantung pada kualitas dan karakteristik kemiskinan dalam rangka pemberian program bantuan/pemberdayaan.



Grafik 2.3 Efektivitas Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 - 2021



Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

Angka kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam 1 (satu) tahun terakhir (2021) selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2017-2021) mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya (2020), pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 97.810 jiwa naik pada tahun 2021 menjadi 100.420 jiwa artinya pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin naik sebanyak 2.610 jiwa. Kenaikan ini membuat target capaian angka kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 26,38% tidak tercapai sehingga diperlukan upaya peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada penanggulangan masalah yang secara langsung terkait dengan dimensi kemiskinan.

Angka tingkat kemiskinan tahun 2021 Kabupaten Sumba Barat Daya masih sangat tinggi dan berada diatas rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walau masyarakat sudah menerima program- program terkait kemiskinan yang sudah makin terfokus kendatipun masih terkendala pada sektor pendanaan yang masih relatif kecil. Kabupaten Sumba Barat Daya memerlukan upaya yang lebih keras untuk melakukan sinkronisasi program-program kemiskinan agar lebih terarah, lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Untuk mengatasi kendala terbatasnya pendanaan, Kabupaten Sumba Barat Daya memerlukan upaya yang lebih keras untuk mengakses sumber daya program percepatan penurunan jumlah penduduk miskin disamping melakukan upaya bagaimana meningkatkan peran masyarakat untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan.

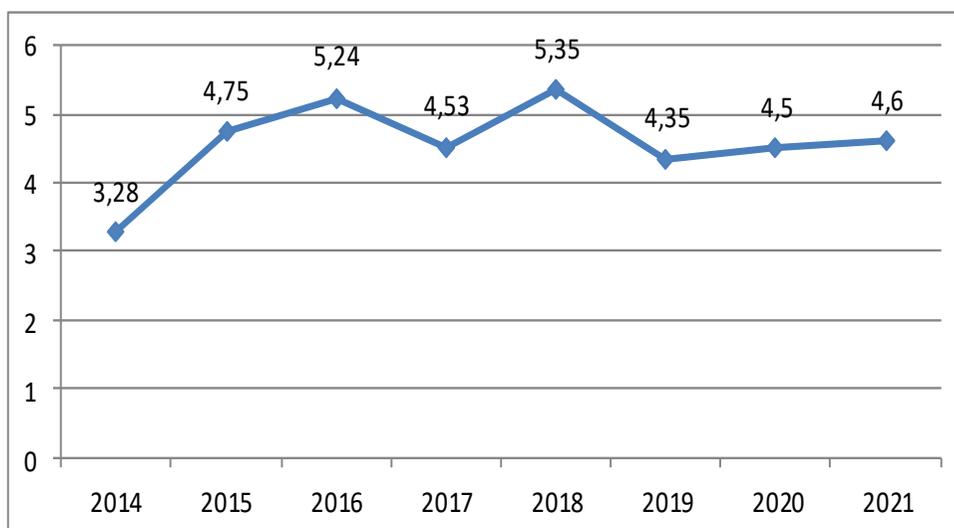


2.2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indikator indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan gambaran kesenjangan kemiskinan, yang menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah khususnya antar Kabupaten/Kota. Adapun gambaran indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

➤ Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan

Grafik 2.4 Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014 – 2021



Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

Indikator indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya terlihat pada grafik 2.5 di atas menunjukkan perkembangan yang fluktuatif/naik-turun. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan berada pada kisaran angka 4,50 namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan 0,10 menjadi 4,60. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya tidak bisa terlepas dari pengaruh perkembangan kondisi sosial ekonomi secara umum akibat kebijakan pusat maupun daerah.

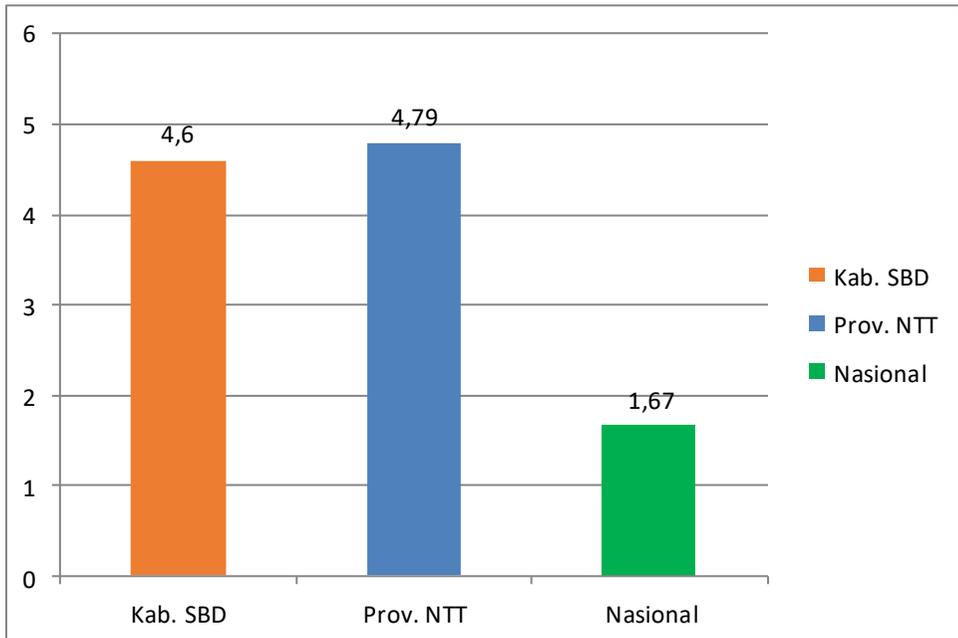
➤ Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan

Perkembangan dari tahun 2017 – 2021, menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Sumba Barat Daya belum mengalami perbaikan yang berarti, walau berada dibawah posisi rata-rata Propinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk tahun 2021, Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami kenaikan indeks kedalaman kemiskinan yang cukup signifikan yakni sebesar 0,10 poin. Kondisi ini mencerminkan



program- program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, kemampuan ekonomi wilayah/daerah tidak banyak berpengaruh terhadap penurunan indeks kedalaman kemiskinan sehingga diperlukan upaya dari Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat untuk menyeimbangkan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Grafik 2.5 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Sumba Barat Daya



Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya sangat tinggi dibanding tingkat nasional akan tetapi berada sedikit di bawah indeks kedalaman kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya yang sangat berfluktuasi/naik-turun menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang menasar penduduk miskin sangat jauh dari kata efektif, efisien dan tepat sasaran. Selain itu, juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya yang belum mengalami perbaikan yang berarti sehingga pertumbuhan investasi di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk penyerapan tenaga kerja masih berkembang cukup lambat sehingga pengaruh terhadap penurunan indeks kedalaman kemiskinan tidak terlalu signifikan.

2.2.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

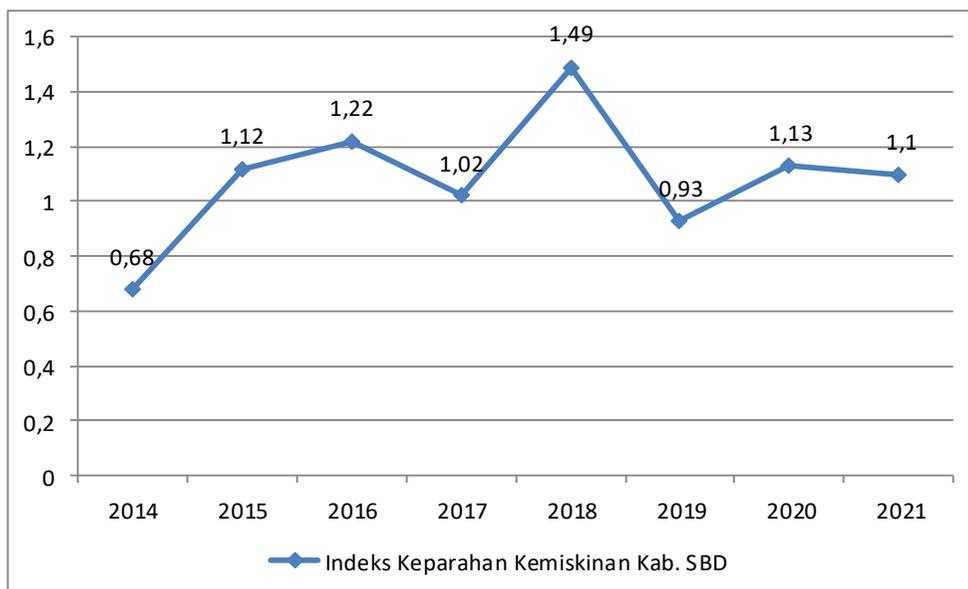
Indikator indeks keparahan kemiskinan menunjukkan gambaran secara kualitas kondisi kemiskinan yang menjadi ukuran pula bagi tingkat kemiskinan atau



indikator kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Adapun gambaran kondisi keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

- Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya

Grafik 2.6 Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014 - 2021



Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

Perkembangan indikator indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya 1 tahun terakhir menunjukkan penurunan dari angka 1,13 menjadi 1,1 seperti terlihat pada grafik 2.7 di atas. Perkembangan demikian menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan (mengurangi keparahan). Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya/kebijakan dan program yang telah diterapkan selama ini di Kabupaten Sumba Barat Daya yang bertujuan untuk meringankan beban hidup masyarakat, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil serta membentuk sinergi program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

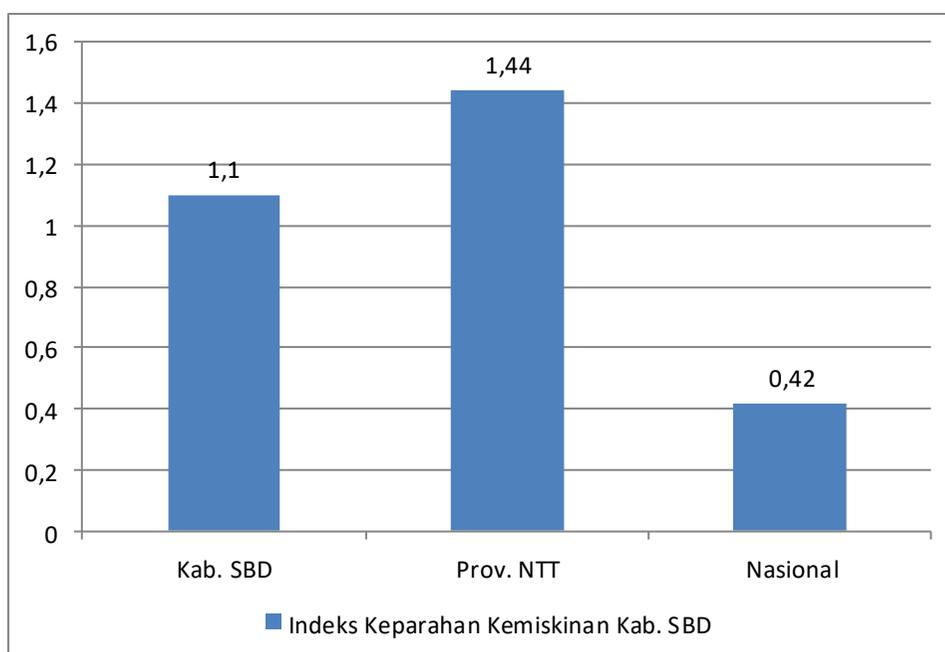
Kalau dilihat perkembangan dari tahun 2014 – 2021 indeks keparahan kemiskinan berfluktuasi karena tergantung dari pada kebijakan, kondisi sosial, politik, ekonomi dan kondisi umum lainnya. Untuk memperbaiki kondisi ini tentu semua pihak perlu memahami dan ikut berperan dalam semua aspek yang mendukung perbaikan indikator.



➤ Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambaran posisi relatif indeks keparahan kemiskinan Kab.Sumba Barat Daya pada tahun 2021 seperti terlihat pada grafik 2.8 di bawah ini menunjukkan adanya suatu perbaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dari angka 1,13 menjadi 1,10 lebih baik sedikit dari rata-rata Propinsi Nusa Tenggara Timur yang Indeks Keparahan Kemiskinannya 1,44 pada tahun yang sama akan tetapi masih lebih jauh dari Indeks Keparahan Kemiskinan nasional.

Grafik 2.7 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran

➤ Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Kabupaten Sumba Barat Daya

Sebagai indikator utama yang terkait langsung dengan kondisi kemiskinan, maka tingkat pengangguran di Kabupaten Sumba Barat Daya menurut data BPS (lihat grafik 2.8), menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2021 tingkat pengangguran 3,88% naik 1,52% dibanding tahun 2020 tingkat penangguran sebesar 2,36%. Kondisi ini masih dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan minimnya pembukaan lapangan kerja diperparah dengan kurangnya semangat berwirausaha pada angkatan kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat



Daya mengingat indikator pengangguran merupakan indikator utama dalam menilai kemiskinan. Perhatian tersebut dapat berupa penciptaan lapangan kerja baru maupun mendorong angkatan kerja untuk berwirausaha dengan memberikan bantuan lunak untuk permodalan maupun bantuan peralatan kerja serta pemasaran produk yang dihasilkan.

Grafik 2.8
Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran
Kabupaten Sumba Barat Daya

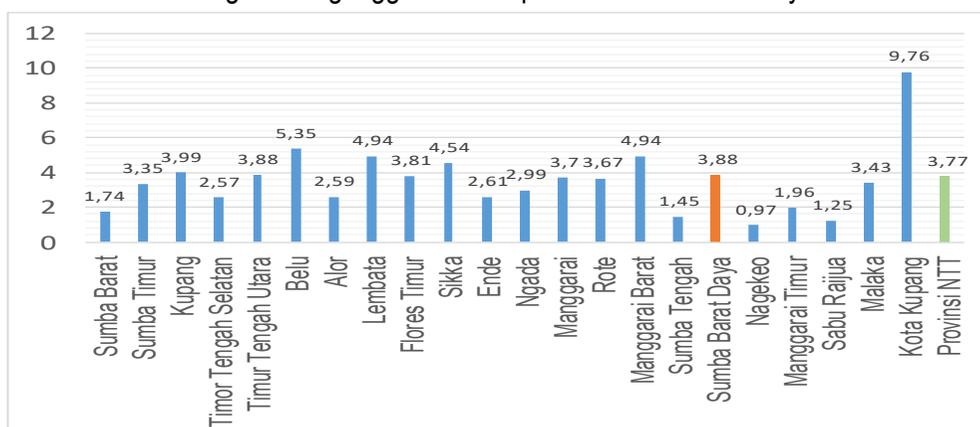


Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

➤ Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Kabupaten Sumba Barat Daya

Analisis posisi relatif indikator tingkat pengangguran (lihat grafik 2.9) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumba Barat Daya menempati posisi ke 16 dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada sedikit di atas rata-rata Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Grafik 2.9
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021



Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2022



2.2.1.5 Analisis Prioritas Dimensi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Analisis prioritas bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 memperlihatkan perkembangan indikator tingkat kemiskinan yang sejalan dengan perkembangan indikator indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Dengan demikian secara efektivitas juga menunjukkan keterkaitan yang mengarah pada perbaikan kondisi kemiskinan. Hanya saja fluktuasi perkembangan indikator tingkat kemiskinan tidak selalu sama dengan indikator indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Begitu juga dengan tingkat pengangguran pengaruhnya cukup kuat terhadap tingkat kemiskinan, kenaikan tingkat pengangguran diikuti pula oleh kenaikan angka kemiskinan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan cenderung naik bersamaan dengan naiknya angka pengangguran artinya bahwa faktor pengangguran berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan. Meskipun gambar analisis menunjukkan perkembangan yang sejalan, namun indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan masih perlu mendapat perhatian karena masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang atau tidak layak dengan meningkatkan porsi pembangunan bagi mereka sehingga tidak menambah kesenjangan baru.

2.2.2 Dimensi Kesehatan

Dimensi kemiskinan pada bidang kesehatan dapat dilihat pada 4 (empat) indikator utama yaitu angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu melahirkan (AKI), prevalensi balita gizi buruk dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Indikator-indikator tersebut akan dianalisis untuk menentukan penyebab utama di bidang kesehatan yang memerlukan intervensi kebijakan untuk memperbaiki capaian indikator utama prioritas yang masih belum baik.

2.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH

Kematian Bayi merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan kejadian kematian bayi.

Pada tahun 2021, jumlah kelahiran bayi hidup berjumlah 5.966 jiwa dengan kasus bayi lahir mati (< 1 tahun) adalah 33 orang sedangkan angka kematian bayi (AKB)/ 1000 kelahiran hidup sebesar 5,53. (selengkapnya lihat tabel 2.5).



Tabel 2.5
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2020-2021

Kecamatan	2020			2021		
	Jumlah Kematian Bayi (< 1 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB	Jumlah Kematian Bayi (< 1 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB
Kodi	0	674	0,00	1	746	1,34
Kodi Balaghar	3	476	6,30	0	499	0,0
Kodi Bangedo	1	341	2,93	1	382	2,62
Kodi Utara	0	958	0,00	8	962	8,32
Kota Tambolaka	0	423	0,00	8	473	16,91
Loura	0	453	0,00	4	451	8,87
Wewewa Barat	0	642	0,00	0	633	0,0
Wewewa Selatan	1	441	2,27	2	500	4,00
Wewewa Tengah	0	616	0,00	4	632	6,33
Wewewa Timur	0	415	0,00	0	483	0,0
Wewewa Utara	1	242	4,13	5	205	24,39
Jumlah	6	5681	1,06	33	5966	5,53

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022

Indikator angka kematian bayi (AKB) 5 poin menjadi 1/1.000 kelahiran hidup yaitu jumlah kematian bayi sebesar 1 jiwa dari jumlah kelahiran hidup yaitu 5.966 orang. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih keras dengan mengefektifkan pelayanan terhadap ibu hamil dan pada masa nifas. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memperpanjang waktu pelayanan di puskesmas dan adanya



fasilitas di Puskesmas Rawat Inap memang dirasa sangat efektif tentu juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Strategi dan usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi dan balita antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi, menanggulangi gizi buruk, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan bayi.

2.2.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

AKI di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 mencapai 235 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut adalah angka kematian dengan faktor pengali 100.000 sedangkan angka absolut kematian ibu adalah 2 orang. Angka kematian ibu menunjukkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Kematian Ibu juga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan penanggulangan kemiskinan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2020-2021

Kecamatan	2020			2021		
	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI
Kodi	2	674	2,97	1	746	1,34
Kodi Balaghar	0	476	0,00	0	499	0,00
Kodi Bangedo	2	341	5,87	0	382	0,00



Kecamatan	2020			2021		
Kodi Utara	0	958	0,00	1	962	1,04
Kota Tambolaka	2	423	4,73	2	473	4,23
Loura	0	453	0,00	1	451	2,22
Wewewa Barat	0	642	0,00	3	633	4,74
Wewewa Selatan	1	441	2,27	2	500	4,00
Wewewa Tengah	1	616	1,62	2	632	3,16
Wewewa Timur	0	415	0,00	2	483	4,14
Wewewa Utara	1	242	4,13	0	205	0,00
Jumlah	9	5681	1,58	14	5966	2,35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022

Indikator Angka Kematian ibu atau *Maternal Mortality Rate* dapat menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu serta keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, fasilitas dan tingkat pelayanan prenatal. Penyebab mendasar kematian ibu melahirkan adalah masalah ekonomi terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, budaya, kondisi bias gender dalam masyarakat dan keluarga, melakukan persalinan di rumah dengan bantuan dukun serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Hal ini diperlukan pendekatan pelayanan program kesehatan ibu dan anak, peningkatan SDM tenaga kesehatan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor.

2.2.2.3 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita (%)

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Berdasarkan penimbangan balita yang dilakukan selama tahun 2018 hingga 2021 kasus balita gizi buruk terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan status gizi buruk di tahun 2021 sebesar 575. Seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan dilakukan perawatan, hal ini sudah merupakan konsensus bahwa setiap kasus gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat Daya hanya mendapatkan perawatan melalui biaya APBD Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.



Tabel 2.7
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018-2021

Tahun	Bayi Lahir	Bayi Berat Badan Lahir Rendah		Bayi Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk	
2018	5.893	99	24	67
2019	5.444	103	36	734
2020	5.681	105	24	1.016
2021	5.966	158	42	575

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022

2.2.2.4 Tenaga Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025, target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk diantaranya rasio dokter umum 42 per 100.000 penduduk dan rasio perawat 180 per 100.000 penduduk. Rasio dokter di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami penurunan dan masih jauh dari jumlah yang seharusnya 45/100.000, yaitu pada tahun 2019 11/100.000 sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 10/100.000, berbeda dengan rasio tenaga paramedis sebenarnya masih dibawah standar namun terjadi peningkatan yaitu di tahun 2020 tersedia 151 paramedis per 100.000 penduduk, dimana seharusnya tersedia 180 paramedis per 100.000 penduduk. Gambaran rumah sakit, dokter dan tenaga paramedis serta rasio per satuan penduduk, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Rasio Rumah Sakit, Dokter dan Rasio Tenaga Paramedis
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Sakit	1	2	2	2
2	Jumlah Dokter	40	38	24	24



3	Jumlah Tenaga Paramedis	509	496	579	666
4	Jumlah Penduduk	338.427	338.427	303.650	305.689
	Rasio Rumah Sakit	0,003	0,006	0,007	0,007
	Rasio Dokter	11/100.000	11/100.000	10/100.000	10/100.000
	Rasio Tenaga Paramedis	150/100.000	149,4/100.000	151/100.000	217/100.000

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022

2.2.2.5 Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai kala IV persalinan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (cakupan PF). Indikator ini menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu bersalin yang berkualitas dan sesuai standar. Kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Cakupan persalinan di Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 2020 – 2021 menunjukkan bahwa persentase pertolongan persalinan tenaga kesehatan mengalami peningkatan yaitu dari 59 % tahun 2020 menjadi 60,4% pada tahun 2021. Angka ini masih jauh dari target kabupaten dimana seharusnya cakupannya mencapai 80% sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dan komprehensif agar cakupan dapat ditingkatkan. Perbandingan antara pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

Kecamatan	2020			2021		
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh ibu bersalin	%	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh ibu bersalin	%
Kodi	554	859	64	577	847	69,3
Kodi Balaghar	341	672	51	327	663	49,3



Kecamatan	2020			2021		
Kodi Bangedo	308	529	58	319	521	61,4
Kodi Utara	798	1321	60	800	716	61,3
Kota Tambolaka	39	517	75	442	510	86,7
Loura	343	464	51	360	457	78,8
Wewewa Barat	489	958	51	470	946	49,5
Wewewa Selatan	276	737	37	248	727	35,3
Wewewa Tengah	578	788	73	580	777	74,6
Wewewa Timur	374	54	687	422	677	62,3
Wewewa Utara	208	389	53	171	384	44,5
Jumlah	4660	7922	59	4.716	7.812	60,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022

2.2.2.6 Analisis Prioritas Bidang Kesehatan

Analisis prioritas bidang kesehatan terlihat bahwa perkembangan indikator tingkat kemiskinan tidak sejalan dengan perkembangan indikator bidang Kesehatan. Dimana indikator tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dari 28% pada tahun 2020 menjadi 28,18 % di tahun 2021 (naik sebesar 0,18%). Sedangkan pada indikator bidang Kesehatan yaitu tingkat Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, cakupan Balita Gizi Buruk, Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan juga terjadi pada indikator rasio dokter dan tenaga paramedis lainnya yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), jumlah balita gizi buruk maupun tingkat kemiskinan.

Jika dilihat dari indikator AKB, AKI dan jumlah balita gizi buruk yang cenderung naik maka perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah karena masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang atau tidak terlayani kesehatannya dengan baik. Caranya adalah dengan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

2.2.3 Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat termasuk wajib belajar dalam rangka persaingan yang lebih adil dan bermartabat. Hal ini sangat



relevan dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari kesenjangan dan mengacu kepada salah satu tujuan SDGs yaitu mengenai pendidikan berkualitas pada tujuan atau GOAL ke 4 (empat). Dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa merupakan kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang didukung oleh masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur, tenaga, anggaran dan program yang tepat, efektif dan memadai.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan yakni kemampuan baca tulis penduduk dewasa (15 Tahun ke atas) atau angka melek huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Rasio guru/murid.

2.2.3.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 mencapai 84,38% dari keseluruhan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 86,30% (lihat tabel 2.10).

Tabel 2.10
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sumba Barat Daya, Tahun 2019 - 2021

Kelompok Umur	2019	2020	2021
15-19	97,02	96,89	98,21
20-24	93,00	95,41	93,07
25-29	93,26	93,79	95,07
30-34	83,67	86,07	89,72
35-39	80,95	90,95	87,78
40-44	78,49	80,17	80,86
45-49	78,97	77,38	78,15
50+	N/A	70,91	61,53
Jumlah Total	86,48	86,30	84,38

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022



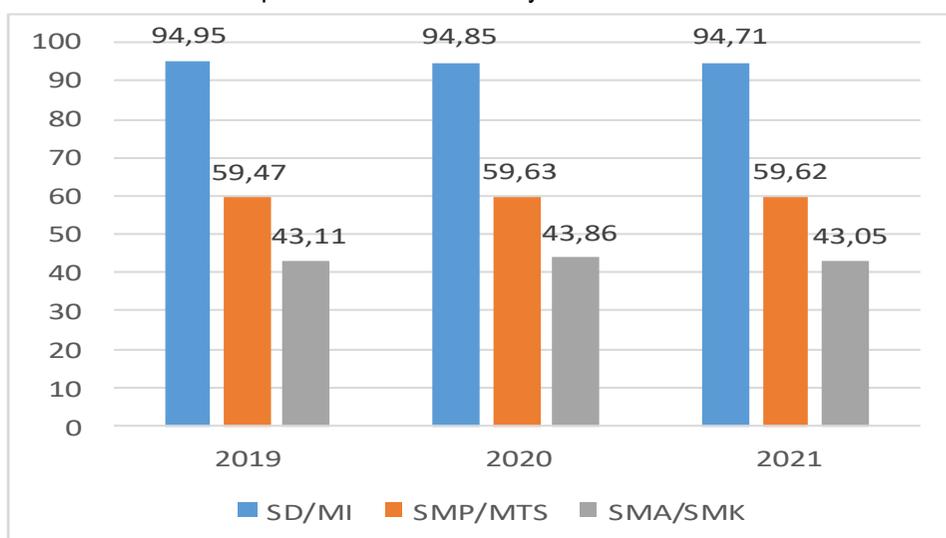
2.2.3.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan meningkatkan pemerataan pada pemanfaatan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur Tingkat Partisipasi Sekolah antara lain adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kotor (APK).

➤ Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Grafik 2.10
Persentase Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2021



Sumber : Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

Keunggulan APM diantaranya dapat mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah dijenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (bersekolah tepat waktu). Kelemahan APM yaitu, tidak dapat menggambarkan anak yang bersekolah diluar kelompok umur disuatu jenjang seperti anak usia 5-6 Tahun, > 12 Tahun yang masih bersekolah di SD/ sederajat.

Pada gambar 2.11 di atas menggambarkan APM penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK sejak Tahun 2019 – 2021 mengalami perkembangan yang beragam dan fluktuatif. Pada Tahun 2019 APM pada jejang SD/MI sebesar 94,95% mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,9% menjadi sebesar 94,85% dan tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 0,14%

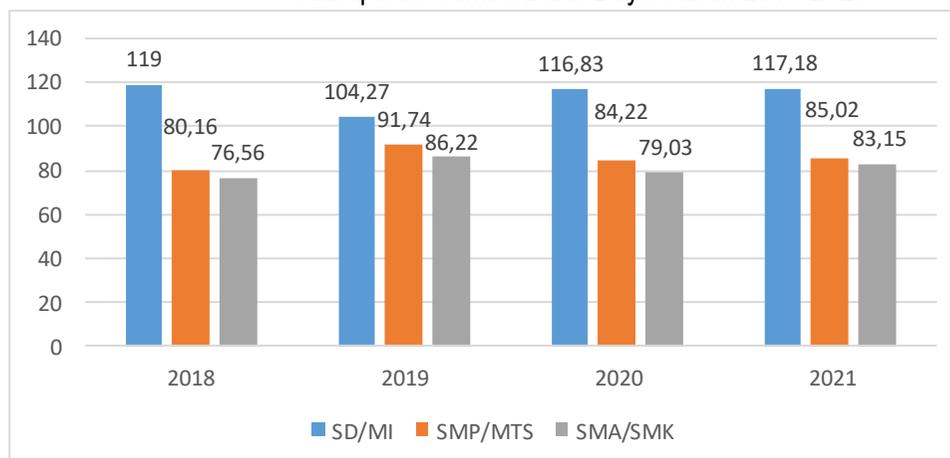


menjadi sebesar 94,71%. Untuk jenjang lanjutan tingkat pertama (SMP/MTS) APM pada tahun 2019 sebesar 59,47% mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,16% menjadi sebesar 59,63% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,1% menjadi sebesar 59,62%. Pada jenjang SMA/SMK APM pada tahun 2019 sebesar 43,11% naik sebesar 0,75% pada tahun 2020 menjadi sebesar 43,86% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,81% menjadi sebesar 43,05%.

➤ Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar lebih menyoroti anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu tanpa memperhatikan usia. Indikator APK ini juga dapat menggambarkan partisipasi dalam rangka pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dasar bagi semua.

Grafik 2.11
Persentase Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA
Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018-2021



Sumber : Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka, 2022

Pada gambar 2.12 di atas menggambarkan APK pada jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK Tahun 2018 – 2021 mengalami perkembangan yang beragam dan fluktuatif. Angka Partisipasi Kasar jenjang SD/MI Tahun 2018 sebesar 119% mengalami penurunan sebesar 14% pada tahun 2019 menjadi 104,27% kemudian naik pada tahun 2020 sebesar 12,56% menjadi sebesar 116,83% sedangkan tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 0,35% menjadi sebesar 117,18%. Demikian selanjutnya, APK mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif pada jenjang Pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



2.2.3.3 Rasio Murid/Guru

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, seharusnya diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga pendidik. Pada tabel 2.11 di bawah ini memperlihatkan bahwa rasio jumlah guru dan murid di Sumba Barat Daya belum proporsional dengan banyaknya murid, ini tentunya bisa berdampak pada pengawasan guru terhadap murid. Rasio Murid - Guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 23,90 mengalami perbaikan dari tahun 2020 yang mencapai 21,20. Perbaikannya rasio Murid - Guru Sekolah Dasar (SD) ini disebabkan karena penambahan jumlah guru Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui formasi Guru Garis Depan (GGD). Rasio Murid - Guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2018 s.d 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Rasio Murid - Guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2019-2021

No	Wilayah	2019			2020			2021		
		Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio
1	Kodi	8.425	188	44,81	6.849	241	28,42	7.532	236	31,92
2	Kodi Balaghar	5.644	108	52,26	4.637	134	34,60	4.618	121	38,17
3	Kodi Bangedo	4.377	102	42,91	3.430	136	25,22	3.381	127	26,62
4	Kodi Utara	14.098	317	44,47	11.305	404	27,98	11.591	369	31,41
5	Kota Tambolaka	4.436	195	22,75	3.986	240	16,61	4.453	231	19,28
6	Loura	3.849	211	18,24	2.930	256	11,45	3.383	252	13,42
7	Wewewa Barat	8.801	318	27,68	6.662	370	18,01	6.640	335	19,82
8	Wewewa Selatan	4.750	149	31,88	3.794	188	20,18	3.567	164	21,75
9	Wewewa Tengah	5.306	219	24,23	4.209	257	16,38	4.396	232	18,95
10	Wewewa Timur	4.828	179	26,97	3.840	221	17,38	4.197	195	21,52
11	Wewewa Utara	2.757	81	34,04	2.046	86	23,79	2.086	75	27,81
Total		67.271	2.067	32,55	53.688	2.533	21,20	55.844	2.337	23,90

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022

Selain permasalahan rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Sumba Barat Daya yang belum proporsional dengan banyaknya murid, juga masalah keterbatasan mengakses pendidikan bagi orang miskin merupakan permasalahan serius yang belum terselesaikan. Keterbatasan akses itu tidak hanya ditingkat dasar tetapi juga dijenjang yang lebih tinggi. Mayoritas kaum miskin yang tinggal ditempat-tempat jauh



yang terpencil praktis kekurangan segalanya, yaitu fasilitas, sumber penerangan, alat-alat transportasi dan komunikasi disamping rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas dalam upaya mendapatkan pendidikan layak, oleh karena itu apabila suatu Negara ingin dapat terlepas dari sebuah jurang kemiskinan dan mendapat kemajuan, serta perkembangan dalam segala aspek kehidupan maka prioritas utama dalam pembangunan adalah pembangunan dibidang pendidikan (Arya Budi, 2013).

Tabel 2.12
Rasio Murid - Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)
di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2021

No	Wilayah	2019			2020			2021		
		Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio
1	Kodi	2.596	110	23,60	1.949	153	12,74	2.675	151	17,72
2	Kodi Balaghar	1.604	49	32,73	1.189	75	15,85	1.850	74	25,00
3	Kodi Bangedo	1.029	49	21,00	942	52	18,12	1.457	50	29,14
4	Kodi Utara	4.328	199	21,75	3.427	235	14,58	4.747	216	21,98
5	Kota Tambolaka	3.086	183	16,86	2.130	226	9,42	2.984	210	14,21
6	Loura	1.836	145	12,66	1.217	143	8,51	1.680	134	12,54
7	Wewewa Barat	3.589	201	17,86	2.568	223	11,52	3.544	205	17,29
8	Wewewa Selatan	1.973	133	14,83	1.642	157	10,46	2.305	145	15,90
9	Wewewa Tengah	2.488	151	16,48	1.621	166	9,77	2.322	166	13,99
10	Wewewa Timur	2.031	148	13,72	1.513	170	8,90	2.190	174	12,59
11	Wewewa Utara	1.060	57	18,60	733	59	12,42	1.110	60	18,50
Total		25.620	1.425	17,98	18.931	1.659	11,41	26.864	1.585	16,95

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022

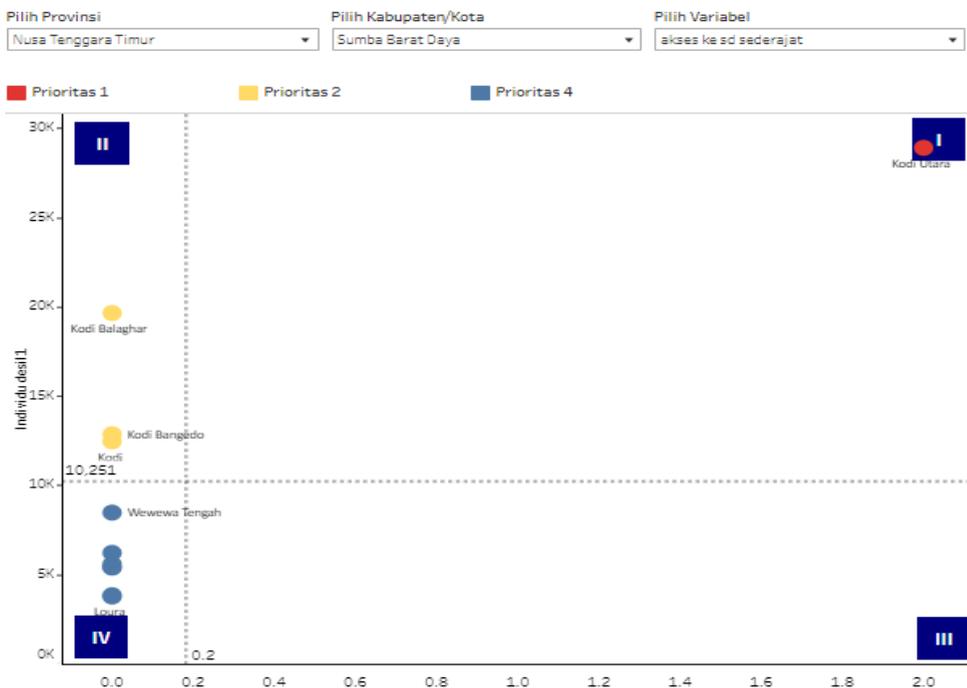
2.2.3.4 Analisis Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

Perkembangan indikator bidang pendidikan seperti Angka Melek Huruf, tingkat partisipasi sekolah dan rasio murid/guru tingkat SD/MI menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun akan tetapi masih belum sejalan dengan penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan walau bidang



pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan melalui program wajib belajar 9 tahun. Oleh karenanya diperlukan analisis penentuan lokasi prioritas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan pada kondisi masyarakat agar lebih tepat sasaran dan terjangkau oleh penduduk yang berada pada kantong-kantong kemiskinan. Masalah utama penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan oleh banyak faktor seperti sulitnya mengakses pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lain. Pada tingkat SD/MI yang menjadi lokasi prioritas 1 (satu) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Kecamatan Kodi Utara, prioritas 2 (dua) adalah Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balagar dan Kecamatan Kodi Bangedo (selengkapnya lihat gambar 2.2), pada tingkat SMP/MTs yang menjadi lokasi prioritas 1 (satu) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Kecamatan Kodi Balaghar prioritas 2 (dua) adalah Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara dan Kecamatan Kodi Bangedo (selengkapnya lihat gambar 2.3) dan pada tingkat SMA/SMK yang menjadi lokasi prioritas 1 (satu) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Kecamatan Kodi Balaghar prioritas 2 (dua) adalah Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara dan Kecamatan Kodi Bangedo (selengkapnya lihat gambar 2.4).

Gambar 2.2
Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SD/MI





Gambar 2.3
Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tingkat SMP/MTs



Gambar 2.4
Penentuan Lokasi Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tingkat SMA/SMK



Sumber : Hasil Olahan Data P3KE Kemenko PMK, 2022



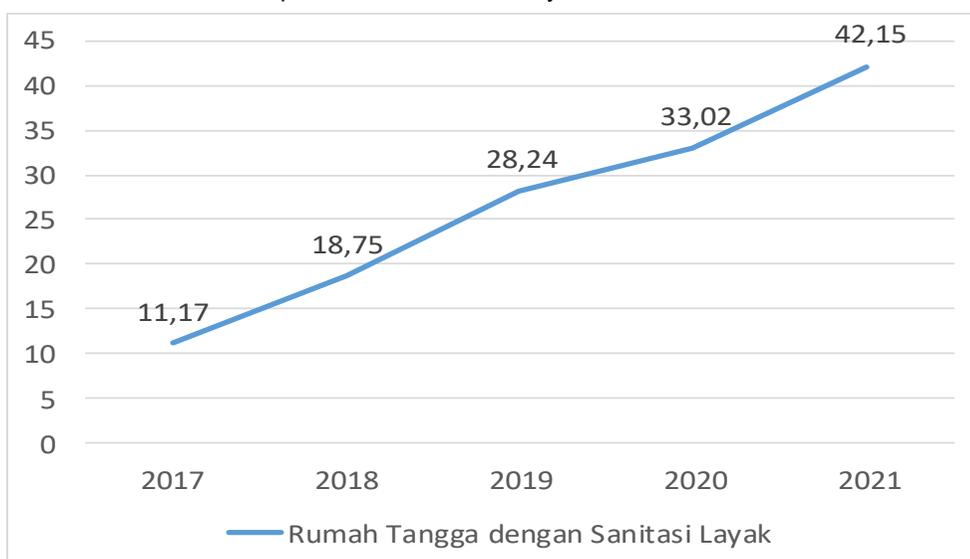
2.2.4 Dimensi Prasarana Dasar

Untuk bidang prasarana dasar, indikator yang dianalisis terkait dengan kondisi kemiskinan antara lain Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%), Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%), Persentase Rumah Tangga Akses Listrik (%) dan Proporsi Akses Jalan R4.

2.2.4.1 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Pada Tahun 2021 capaian Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak adalah Kabupaten Flores Timur sebesar 93,06% sedangkan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan presentase terendah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak adalah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 42,15% sangat jauh dari capaian rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 73,36%. Walau capaian Kabupaten Sumba Barat Daya paling rendah dalam hal rumah tangga dengan sanitasi layak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan tetapi perkembangannya cukup baik karena mengalami pertumbuhan yang cukup besar setiap tahunnya. Tahun 2021 capaian rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 42,15% naik sebesar 9,13% dibanding tahun 2020 rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 33,02% (selengkapnya lihat grafik 2.12).

Grafik 2.12
Perkembangan Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak
di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2017 -2021



Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2022



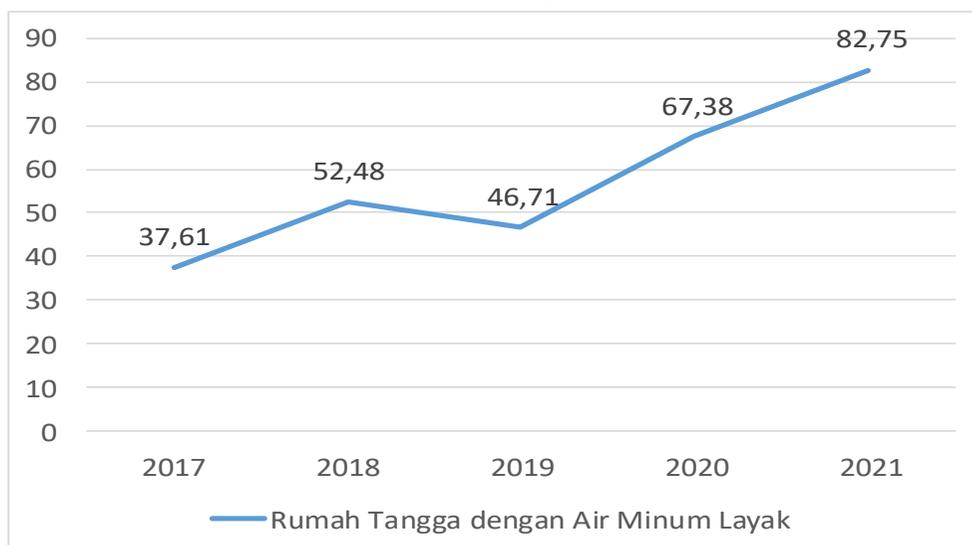
Banyak faktor penyebab rendahnya rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Sumba Barat Daya seperti kondisi alam/geografis, kondisi ekonomi rumah tangga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat dan menggunakan fasilitas tempat BAB yang layak bagi rumah tangganya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih, dan lain-lain. Oleh karena itu peran pemerintah dan swasta sangat diharapkan dalam membantu kepada masyarakat yang kurang mampu khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dalam setiap rumah tangga masyarakat sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sehingga lingkungan tetap sehat dan tidak tercemar karena adanya tinja di sekitar rumah.

Faktor yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan kloset cemplung/cubiu antara lain dikarenakan masyarakat di desa belum mengetahui dengan baik manfaat menggunakan kloset yang baik (leher angsa), tidak terjangkau harga kloset leher angsa (kloset yang baik) dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perubahan perilaku untuk hidup sehat dan bersih (sanitasi dan higienitas) dan sebagainya.

2.2.4.2 Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Sumba Barat Daya setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2021 Persentase penduduk berakses air minum layak di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 82,75% naik 15,37% dibanding tahun 2020 rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sebesar 67,38% (selengkapnya lihat gambar 2.13).

Grafik 2.13
Perkembangan Rumah Tangga dengan Air Minum Layak
di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2017 -2021



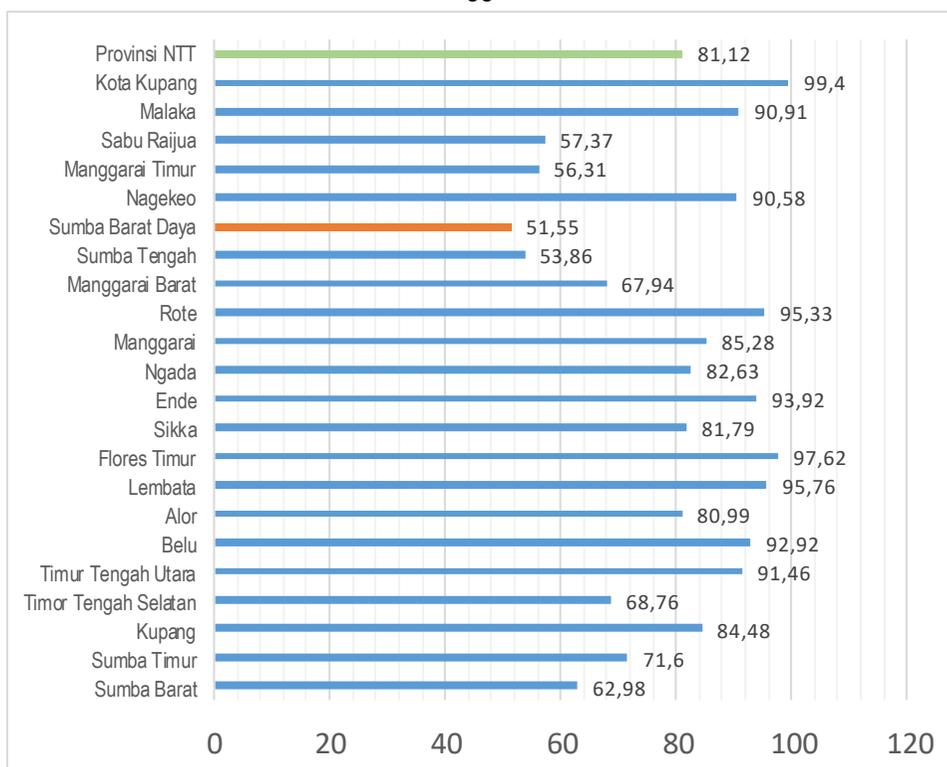
Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2022



2.2.4.3 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Berdasarkan sumber penerangan rumah tangga (Listrik PLN, Listrik Non PLN dan Bukan Listrik) pada tahun 2021 persentase rumah tangga dengan akses listrik PLN di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 51,55%, rumah tangga dengan akses listrik non PLN sebesar 24,31% dan rumah tangga dengan penerangan bukan listrik sebesar 24,14%. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi Kabupaten dengan rumah tangga berakses listrik paling rendah dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (selengkapnya lihat grafik 2.14).

Grafik 2.14
Rumah Tangga dengan Akses Listrik
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021



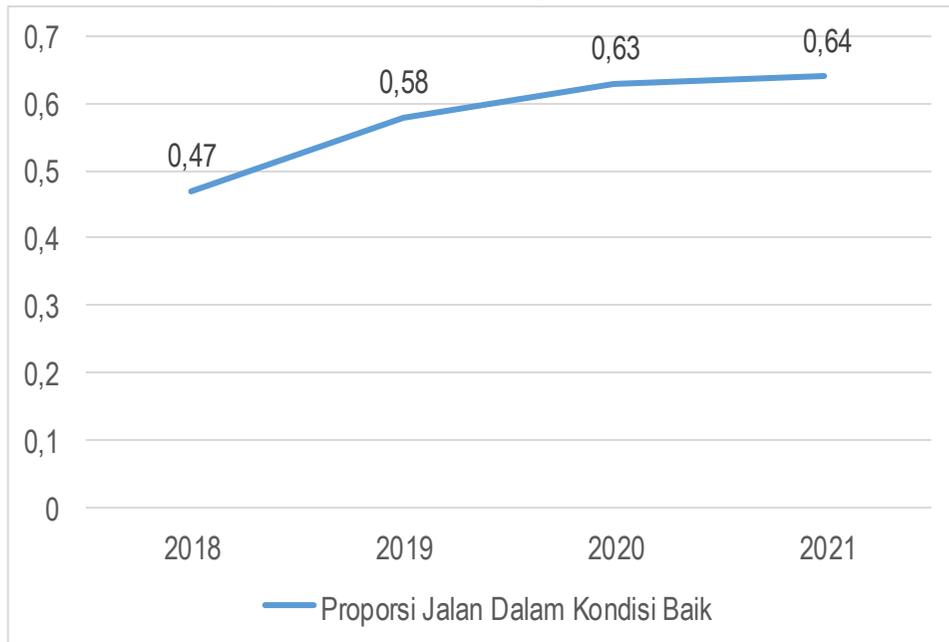
Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2022

2.2.4.4 Proporsi akses jalan R4 sepanjang Tahun

Panjang jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2021 adalah 1.136.30 km (sesuai SK Bupati Sumba Barat Daya No. 563/KEP/HK/2015). Pada tahun 2021 jalan dengan kondisi baik proporsinya sebesar 0,64/732,14 km mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 jalan dengan kondisi baik proporsinya sebesar 0,63/717,14 km (selengkapnya lihat grafik 2.15).



Grafik 2.15
Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 – 2021



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2022 (diolah)

2.2.4.5 Analisis Prioritas Lokasi Pembangunan Prasarana Dasar

Perkembangan kondisi prasarana dasar seperti persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, persentase rumah tangga dengan air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses listrik dan proporsi akses jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya cukup berfluktuasi dengan angka kemiskinan. Peningkatan pembangunan pada prasarana dasar tidak membuat tingkat kemiskinan menurun di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang menyebabkan naik turunnya tingkat kemiskinan selain dengan meningkatkan usaha pembangunan pada bidang prasarana dasar, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ketahanan pangan yang merupakan indikator represetatif yang menggambarkan tingkat kemiskinan tetapi juga perlu melakukan perbaikan pada target sasaran pembangunan agar lebih tepat sasaran dengan melakukan analisis berbasis data sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang berbasis fakta.

Berdasarkan data nilai indeks dimensi pelayanan dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Bangedo dan Kecamatan Kodi Balaghar masuk menjadi lokasi prioritas pertama pembangunan prasarana dasar (selengkapnya lihat gambar 2.5), sedangkan berdasarkan data nilai indeks akses ke energi listrik di Kabupaten Sumba Barat Daya Kecamatan Kodi,

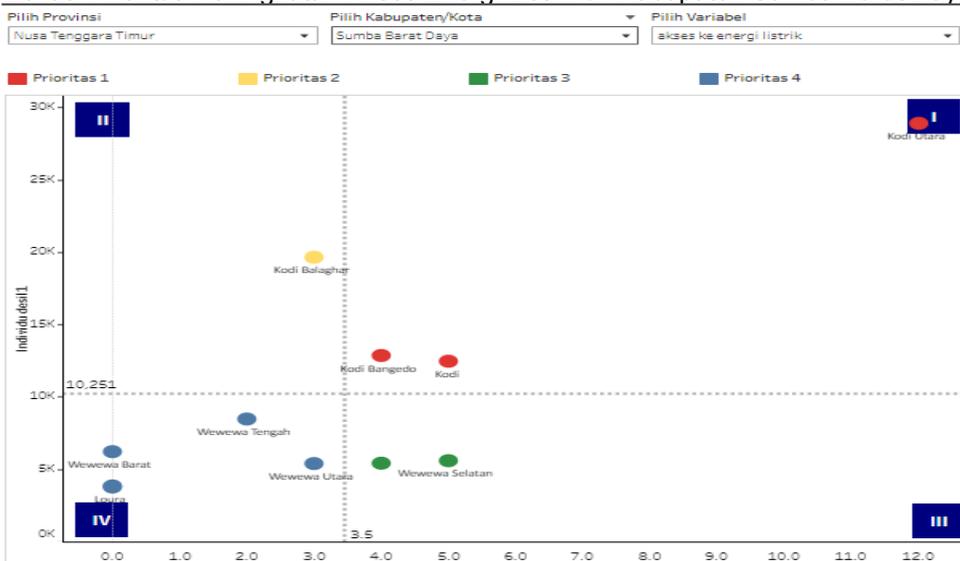


Kecamatan Kodi Utara dan Kecamatan Kodi Bangedo menjadi lokasi prioritas pertama pembangunan (selengkapnya lihat gambar 2.6) dan berdasarkan data nilai indeks aksesibilitas jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Bangedo dan Kecamatan Kodi Balaghar menjadi lokasi prioritas pertama pembangunan (selengkapnya lihat gambar 2.7).

Gambar 2.5
Lokasi Prioritas Pembangunan Prasarana Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya



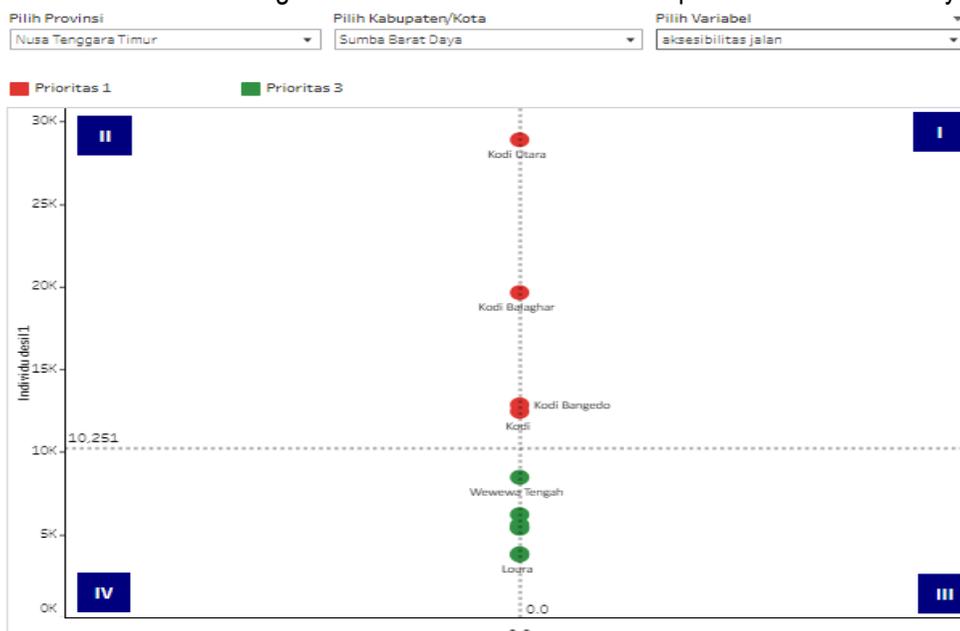
Gambar 2.6
Lokasi Prioritas Peningkatan Akses Energi Listrik di Kabupaten Sumba Barat Daya





Gambar 2.7

Lokasi Prioritas Peningkatan Aksesibilitas Jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya



Sumber : Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022

2.2.5 Dimensi Ketahanan Pangan

Indikator yang digunakan untuk menganalisis dimensi ketahanan pangan terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Luas panen (ha) produktifitas (ton/ha) dan produksi (ton), Harga komoditas pangan pokok (Rp) dan Ketersediaan pangan utama.

2.2.5.1 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Data perkembangan luas panen, produktifitas dan produksi komoditi hasil pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya didominasi oleh Jagung dan Padi dibandingkan komoditi lainnya. Hasil produksi padi di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 sebesar 94.630 ton sedangkan hasil produksi Jagung sebesar 137.511 ton (selengkapnya lihat tabel 2.13). Padi dan jagung menjadi komoditi yang paling banyak ditanam di Kabupaten Sumba Barat Daya dikarenakan selain menjadi makanan pokok masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya juga dikarenakan mudah ditanam dan cepat bisa beradaptasi dengan kondisi geografi dan iklim cuaca yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hasil produksi padi cukup stabil dikarenakan area penanaman padi adalah area yang sama ditanam dari tahun ke tahun. Jika mengalami kenaikan atau penurunan hasil produksi, itu pun bukan hasil yang signifikan.



Tabel 2.13
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas hasil pertanian di
Kabupaten Sumba Barat Daya, 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Padi			
	Luas tanam (ha)	25.373	28.264	27.851
	Luas panen (ha)	27.037	27.037	27.037
	Produktivitas (kw/ha)	35	35	35,00
	Produksi (ton)	94.630	94.630	94.630
2	Padi Sawah			
	Luas tanam (ha)	7.467	8.111	8.383
	Luas panen (ha)	9.768	6.664	8.111
	Produktivitas (kw/ha)	42	42	42,0
	Produksi (ton)	41.026	27.989	34.066
3	Padi Ladang			
	Luas tanam (ha)	17.906	20.153	19.468
	Luas panen (ha)	16.319	17.422	20.153
	Produktivitas (kw/ha)	29	29	29
	Produksi (ton)	47.325	50.524	58.444
4	Ubi Kayu			
	Luas tanam (ha)	280	2.459	2.903
	Luas panen (ha)	3.266	3.266	1.108
	Produktivitas (kw/ha)	103	103	103
	Produksi (ton)	33.640	33.640	11.412
5	Ubi Jalar			
	Luas tanam (ha)	6	1.015	1.466
	Luas panen (ha)	125	125	968
	Produktivitas (kw/ha)	80	80	80
	Produksi (ton)	1.000	1.000	7.744
6	Kacang Tanah			
	Luas tanam (ha)	101	97	350
	Luas panen (ha)	161	161	97
	Produktivitas (kw/ha)	13	13	13
	Produksi (ton)	209	209	126
7	Kacang Hijau			
	Luas tanam (ha)	311	20	41
	Luas panen (ha)	311	311	20
	Produktivitas (kw/ha)	11	11	11
	Produksi (ton)	342	342	22
8	Kacang Kedelai			



No	Uraian	2019	2020	2021
	Luas tanam (ha)	22	89	25
	Luas panen (ha)	32	35	89
	Produktivitas (kw/ha)	13	13	13
	Produksi (ton)	42	46	116
9	Jagung			
	Luas tanam (ha)	45.085	43.270	21.427
	Luas panen (ha)	38.255	37.061	36.187
	Produktivitas (kw/ha)	38	38	38
	Produksi (ton)	145.369	140.832	137.511

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022

Strategi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk meningkatkan ketersediaan pangan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, perluasan lahan sawah, mengurangi dampak iklim dan memperkuat kelembagaan petani. Sedangkan untuk meningkatkan produktivitas dilakukan dengan sekolah lapang pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (SLPTT), melakukan perbaikan penggunaan varietas tanaman, melakukan pemupukan berimbang (baik pupuk unorganik dan organik maupun bio hayati), melakukan pengelolaan air dan memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi.

2.2.5.2 Harga komoditas pangan pokok (Rp)

Harga komoditas pangan pokok berupa beras medium, jagung, kedelai dan pangan pokok lainnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sesuai dengan naiknya harga barang secara nasional. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.14
Rata-Rata Harga Bahan Pangan Pokok Kabupaten Sumba Barat Daya 2021

NO	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (RP/KG)
			Mg I
1	Beras		
	Super	kg	15.000
	Medium (giling lokal)	Kg	12.000
	Lokal/mol/tumbuk	Kg	10.000
2	Jagung (Kuning)		
	Pipilan Kering	Kg	5.000
3	Ubi		
	Ubi kayu (Umbi Basah)	Kg	10.000
	Ubi Rambat (Umbi Basah)	Kg	10.000
4	Kacang(Biji Kering)		



NO	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (RP/KG)
	Kacang Kedelai	kg	20.000
	Kacang Hijau	Kg	15.000
	Kacang Tanah	Kg	25.000
5	Daging		
	Daging Sapi	Kg	150.000
	Daging Ayam Broiler	Kg	50.000
	Daging Ayam Kampung	Kg	75.000
6	Telur Ayam		
	Ayam Ras	Rak	50.000
	Ayam Buras	Rak	75.000
7	Gula Pasir		
	DN Putih	Kg	15.000
	DN Merah	Kg	15.000
8	Terigu		
	Kompas	Kg	8.000
	Segitiga Biru	Kg	10.000
	Lencana Merah/Sejenisnya	Kg	9.000
9	Minyak Goreng		
	Bimoli 620 ml	Botol	12.000
	Lokal (Minyak kelapa)	Botol	20.000
	Tanpa Merek (Curah)	Botol	10.000
10	Cabe		
	Merah Keriting	kg	60.000
	Rawit	Kg	70.000
11	Bawang		
	Bawang Merah	Kg	25.000
	Bawang Putih	kg	30.000

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022

2.2.5.3 Ketersediaan pangan utama

Ketersediaan pangan utama (padi, jagung dan ubi kayu) rata-rata sebesar 495 kg per penduduk/tahun, diperoleh dari pangan utama tahun 2019 sejumlah 154.920.188 kg/tahun. Standar konsumsi pangan masyarakat NTT 134,50 kg/orang/tahun (0,37 kg/kapita/hari atau 368 gram/kapita/hari). Sementara ketersediaan energi tahun 2019 berjumlah 2.514 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein perkapita mencapai 59,53 gram/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein berasal dari 11 (Sebelas padian, makanan berpati, gula, buah/biji berminyak, buah - buahan, sayuran, daging, telur, susu, ikan, dan minyak/lemak (nabati dan hewani). Standar energi dan protein untuk tingkat nasional adalah 2.400 kkal/kapita/hari dan



protein 62,01: / gram/kapita/hari. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15
Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020	2021
1	Ketersediaan pangan utama		
1.1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)	129.955.000	154.920.188
1.2	Jumlah penduduk (jiwa)	338.427	344.720
	Ketersediaan pangan per penduduk per tahun (kg)	384	495
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	-	-
2.1	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	2.421	2.514
2.2	Ketersediaan protein(gram/kapita/hari)	62,01	59,53

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022



BAB III

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN



3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Sesuai Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya 2019 - 2024 diletakkan pada rumusan Visi yakni **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA BARAT DAYA YANG MAJU, BERKUALITAS, BERDAYA SAING, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA”** yang akan menjiwai RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024. Visi ini mengandung pengertian bahwa kondisi masyarakat Sumba Barat Daya pada masa 5 (Lima) tahun ke depan akan mengalami peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai dampak dari kemajuan tata kelola pemerintahan dan proses pembangunan yang demokratis dan akuntabel serta pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih berkualitas. RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 merupakan periode ketiga RPJPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 – 2025 dengan arah kebijakan yaitu percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh sumber daya manusia berkualitas.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Sumba Barat Daya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan langkah-langkah strategis dengan menetapkan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2019-2024. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah harus relevan, terukur, dan realistis sesuai karakteristik daerah dan sesuai konteks kehidupan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Tabel 3.1
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019 – 2024
Arah Kebijakan

- | | |
|-------------------|---|
| Tahun 2020 | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat• Meningkatkan jumlah dan kualitas perumahan/ permukiman dan lingkungan hidup• Meningkatkan ketersediaan fasilitas publik, pelayanan transportasi dan komunikasi |
| Tahun 2021 | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah |



- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan publik
- Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah

- Tahun 2022**
- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan antar kelompok masyarakat serta terwujudnya ketertiban dan keamanan di masyarakat
 - Meningkatkan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta meningkatkan kesadaran gender di kalangan masyarakat

- Tahun 2023**
- Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang usaha perekonomian masyarakat
 - Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan dalam menopang ketersediaan bahan pangan

- Tahun 2024**
- Meningkatkan partisipasi angkatan kerja, kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan keluarga berencana
 - Meningkatkan pariwisata dan mewujudkan pelestarian budaya dan adat-istiadat

Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya telah berjalan seiring dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan juga tidak terlepas dari prinsip dan strategi penanggulangan kemiskinan nasional yang dipedomani oleh TNP2K. Dalam melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran (targeted program). Program – program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menasaskan langsung kepada mereka yang tergolong miskin dan mendekati miskin.

Selain mengamankan pembentukan TNP2K ditingkat pusat, Perpres Nomor 15 tahun 2010 yang dirubah dengan Pepres Nomor 96 tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan juga mengamankan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.42 tahun 2010 dicabut dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan



Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 174 tahun 2021.

Kebijakan Umum Pembangunan Daerah diarahkan untuk menjadi dasar yang memperkuat program prioritas pembangunan daerah sebagai program unggulan untuk mempercepat pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 – 2024, salah satunya prioritas pembangunan daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2019 - 2024 disebut sebagai Kebijakan Membangun Tiga Batu Tunggu, yaitu membangun 3 wilayah strategis yakni wilayah Loura, Wewewa dan Kodi dengan Kebijakan Tiga Batu Tunggu, yakni:

- Batu Tunggu Pertama : Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk, kebijakan pembangunan diarahkan kepada:
 - a. Pengurangan jumlah dan proporsi penduduk miskin
 - b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan derajat kesejahteraan penduduk
 - c. Peningkatan pemerataan ekonomi, lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
 - d. Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Batu Tunggu Kedua : Meningkatkan Pelayanan Publik, kebijakan pembangunan diarahkan kepada:
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan
 - b. Peningkatan akses dan layanan kesehatan
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana transportasi
 - d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
 - e. Peningkatan pelayanan infrastruktur listrik dan energi
 - f. Penataan sistem pelayanan publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - g. Peningkatan pengelolaan keuangan dan fiskal daerah
 - h. Peningkatan sistem kelembagaan ekonomi petani
 - i. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan
 - j. Peningkatan pelayanan sanitasi, persampahan, drainase dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - k. Peningkatan fungsi dan peran lembaga sosial politik dan kemasyarakatan
 - l. Penataan dan perbaikan sistem pelayanan dan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta lembaga penyelenggara negara
- Batu Tunggu Ketiga: Meningkatkan Daya Saing Daerah, kebijakan pembangunan diarahkan kepada:



- a. Peningkatan kesejahteraan dan daya saing petani
- b. Peningkatan produksi pertanian yang bermutu dan berdaya saing
- c. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- e. Peningkatan aksesibilitas daerah
- f. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- g. Peningkatan sumber penerangan dan energi
- h. Peningkatan sarana perdagangan dan investasi di daerah
- i. Peningkatan kualitas tenaga kerja, angkatan kerja dan keterampilan kerja

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 yang mengalami kenaikan dan masih sangat besar (28,18%) sehingga diperlukan komitmen yang tinggi untuk bisa menurunkan angka kemiskinan. Walaupun kenaikan angka kemiskinan lebih disebabkan oleh dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak program pembangunan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran. Walau demikian pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan telah melakukan beberapa kebijakan seperti :

1. Melakukan koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas SKPD terkait
2. Mengalokasikan dana setiap tahun untuk program penanggulangan kemiskinan
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Akibat berbagai perkembangan kondisi faktual yang terjadi, maka sebelum memasuki tahun ke empat pelaksanaan RPJMD, perlu dilakukan perubahan RPJMD yang disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

- Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja daerah khususnya untuk tahun 2021, sedangkan tahun 2022 belum bisa digunakan, karena tahun 2022 belum berakhir. Pencapaian kinerja daerah secara umum sebagai berikut :
- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 sebesar 2,08%, naik sebesar 1,98% dari tahun 2020 pertumbuhan ekonomi 0,10%. Lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang tumbuh sebesar 2,51% pada tahun 2021.
 - b. Angka kemiskinan naik dari 28% keadaan September 2020 menjadi 28,18% keadaan September 2021.
 - c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 0,1 poin, dari 62,28 poin pada tahun 2020 menjadi 62,29



poin pada tahun 2021. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami perubahan, yaitu usia harapan hidup dari 68,53 tahun pada 2020 meningkat menjadi 68,57 tahun pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 6,34 tahun pada 2020 menjadi 6,35 tahun pada 2021.

- d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 2,04% turun 0,32% dibanding tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,36% (selengkapnya lihat tabel 3.2).

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Daerah Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2020		Capaian 2021	
			NTT	SBD	NTT	SBD
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,83	0,10	2,51	2,08
2	Angka Kemiskinan	%	21,09	28	20,90	28,18
3	IPM	Poin	65,19	62,28	65,28	62,29
4	Inflasi	%	0,61	0,12	1,67	1,28
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,28	2,36	3,77	2,04

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2022

- Terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain : a) Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan selanjutnya dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, serta b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Terjadinya wabah Pandemi *COVID-19* dan Badai Seroja yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Frasa mendekati yang digunakan adalah suatu bentuk penyesuaian pencapaian hasil yang disebabkan terjadinya berbagai pembatasan akibat mewabahnya Covid 19. Berbagai kebijakan yang diambil terkait Pandemi Covid 19 termasuk pembatasan yang dilakukan menyebabkan target-target pembangunan pada RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 yang ditetapkan sebelumnya tidak sepenuhnya tercapai. Melalui perubahan RPJMD Kabupaten



Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 ini, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki acuan yang sama dan dalam semangat kemitraan, masing-masing pihak dapat mengambil peran yang tepat untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan di Sumba Barat Daya.

Agar tujuan dari visi misi pembangunan daerah menuju Kabupaten Sumba Barat Daya yang maju, berkualitas, berdaya saing, demokrasi dan sejahtera maka percepatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan multidimensi dalam program lintas pembangunan dengan mensinergikan peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, terpadu, dan multidimensi, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya diarahkan kepada memprioritaskan Tujuh Program Unggulan *Tujuh Jembatan Emas (Pitu Lede Moripa, Pitu Lende Mopir)* yaitu (1) *Desa Bercahaya*, (2) *Desa Berair*, (3) *Desa berkecukupan Pangan*, (4) *Desa Sehat*, (5) *Desa Cerdas*, (6) *Desa Tenteram*, dan (7) *Desa Wisata* sehingga mewujudkan tingkat kehidupan manusia yang sejahtera dan bermartabat mulai dari level desa (hulu ke hilir).

1. Desa Bercahaya

Listrik sebagai sumber penerangan dan energi memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Sumba Barat Daya. Dibawah kepemimpinan periode ini dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP menargetkan lima tahun ke depan seluruh desa di Kabupaten Sumba Barat Daya bercahaya, artinya rakyat miskin yang tinggal di desa hingga kampung-kampung harus menikmati layanan penerangan listrik. Pemasangan listrik tersebut akan berlangsung secara bertahap. Agar program tersebut dapat berjalan mulus maka pemerintah secara teknis juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya PLN, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Desa Berair

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Ketersediaan air bersih masih menjadi masalah utama di Indonesia terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk di Kabupaten Sumba Barat Daya.

3. Desa Berkecukupan Pangan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menginginkan agar kebutuhan pangan utama maupun kebutuhan gizi masyarakat Sumba Barat Daya dapat terpenuhi dalam menyiapkan generasi yang sehat, kuat dan cerdas

4. Desa Sehat

Desa sehat adalah desa yang masyarakatnya memiliki pengetahuan tentang Kesehatan termasuk berkecukupan pangan dan gizi, mampu menerapkan pola



budaya hidup sehat dan bersih baik jasmani maupun rohani, serta mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kelangsungan hidupnya baik untuk diri sendiri maupun orang lain serta sehat juga dalam arti mandiri secara ekonomi.

5. Desa Cerdas

Desa cerdas ditandai oleh warga desa yang cerdas, mampu menyelesaikan persoalan desa secara cepat, bijaksana sesuai kearifan budaya Sumba, dan warga cerdas pula memanfaatkan lingkungannya untuk peningkatan pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

6. Desa Tenram

Desa Tenram yang dimaksudkan adalah menghadirkan kembali pemerintahan desa yang dipercaya, memberikan ketentraman, rasa aman, memperkuat jati diri, berbasis potensi dan aset desa, nilai-nilai sosial-budaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

7. Desa Wisata

Program Desa Wisata sebagai jembatan emas ketujuh yang bisa menggenjot peningkatan ekonomi desa hingga kabupaten, maka diperlukan dukungan utama dari segenap aktor untuk membangun Desa Wisata, membangun icon baru yang memperkaya wajah pariwisata SBD.

Detil rincian program unggulan (anggaran dan realisasi) di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan seperti terlihat pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Rincian Program Unggulan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021

Perangkat Daerah Penanggungjawab	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	62890297868	57466640658	Desa Cerdas
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	31527013726	32924443944	Desa Cerdas
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7232341000	7161931386	Desa Cerdas
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1845411750	1240657772	Desa Cerdas
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	138204790013	110210504471	Desa Sehat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	15168193890	13762935884	Desa Sehat
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	28720000	26200000	Desa Sehat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	10200000	0	Desa Sehat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10611035482	9667792400	Desa Berair
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15384347000	14889278798	Desa Berair
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9711315000	9674079000	Desa Berair
	Program Pengembangan Permukiman	850000000	816724179	Desa Tenram



	Program Penataan Bangunan Gedung	1548276400	185232200	Desa Tentram
	Program Penyelenggaraan Jalan	54357274664	53004369083	Desa Tentram
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1084753700	1066633150	Desa Tentram
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	221725000	216111600	Desa Tentram
	Program Kawasan Permukiman	6908408000	6775496047	Desa Tentram
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1124550000	1086883000	Desa Tentram
Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	172264000	171366530	Desa Tentram
	Program Rehabilitasi Sosial	270175800	269334000	Desa Tentram
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	928151000	922695800	Desa Tentram
	Program Penanganan Bencana	333884950	332574150	Desa Tentram
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	380958200	313473500	Desa Tentram
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5205497300	4436883785	Desa Sehat
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1880410550	1751458700	Desa Tentram
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	106057000	100286000	Desa Tentram
	Program Perlindungan Khusus Anak	37254000	29023000	Desa Tentram
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	1269118250	1135866050	Desa Tentram
	Program Pencatatan Sipil	256790750	242408550	Desa Tentram
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penataan Desa	348260250	207009250	Desa Tentram
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4212863550	3907140125	Desa Tentram
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	27166000	26350000	Desa Tentram
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	7549832600	7408148592	Desa Tentram
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	50713000	50713000	Desa Tentram
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	411685400	391654903	Desa Tentram
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	127437300	96761300	Desa Tentram
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	94880000	94880000	Desa Tentram
	Program Pengembangan UMKM	123032500	119139657	Desa Tentram
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	122288500	122117100	Desa Tentram
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1509836850	1494953949	Desa Tentram
	Program Pelayanan Penanaman Modal	529882100	527821600	Desa Tentram
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1120553180	1105420480	Desa Tentram
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	805433615	760584741	Desa Tentram
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5091914600	5053115690	Desa Berkecukupan Pangan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1447157860	1444289500	Desa Berkecukupan Pangan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	137867200	137032000	Desa Berkecukupan Pangan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	294174000	294174000	Desa Berkecukupan Pangan



Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	152579540	143159540	Desa Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	238581920	235340920	Desa Pariwisata
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4602209040	4261226544	Desa Berkec ukupan Pangan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1340198000	1337652613	Desa Berkec ukupan Pangan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1057554575	1050472978	Desa Berkec ukupan Pangan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	37784500	31484500	Desa Berkec ukupan Pangan
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7153843000	6561815115	Desa Berkec ukupan Pangan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3892769100	3842994480	Desa Berkec ukupan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	89036350	83294050	Desa Berkec ukupan Pangan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1096982248	1064280648	Desa Berkec ukupan Pangan
	Program Penyuluhan Pertanian	1299458300	1269744300	Desa Berkec ukupan Pangan
Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6641409500	6102380486	Desa Tentram
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1414507650	1160809570	Desa Tentram

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

3.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disebutkan tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu :

- a) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- d) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tersebut dipedomani di Kabupaten Sumba Barat Daya dan dituangkan secara legal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Keempat strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diterjemahkan lebih rinci sebagai berikut.



Strategi 1 : Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin diwujudkan dalam bentuk peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat miskin. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat miskin.

Strategi 2 : Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin

Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapinya. Setelah kemampuan masyarakat miskin meningkat dalam mengakses berbagai sumber daya, maka masyarakat miskin memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya dengan membuka usaha baru, meningkatkan usaha yang sudah ada, dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin lainnya.

Dalam rangka efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat miskin merupakan suatu langkah yang penting. Penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat miskin akan menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek atau aktor pembangunan, bukan sebagai objek pembangunan. Apabila masyarakat miskin telah menjadi berdaya, maka masyarakat miskin dapat secara mandiri keluar dari persoalan kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam jurang kemiskinan.

Strategi 3 : Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil

Sebagian masyarakat miskin telah memiliki usaha yang selama ini dijadikan tumpuan hidup untuk menafkahi keluarganya. Umumnya usaha yang dimiliki oleh masyarakat miskin memiliki skala kecil dan mikro. Dengan skala usaha yang kecil dan mikro, maka pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut relatif kecil sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil dapat berperan mengembangkan usaha tersebut, baik dalam aspek kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat diwujudkan dalam bentuk perluasan akses usaha mikro dan kecil terhadap permodalan dan pemasaran dalam rangka penguatan ekonomi usaha mikro dan kecil sehingga pendapatan



yang diperoleh akan meningkat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Strategi 4: Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Strategi mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dibedakan ke dalam 4 (empat) kelompok/kluster sebagai berikut.

Kelompok 1: Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin, keluarga miskin, dan keluarga hampir miskin. Cakupan program pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, antara lain :

- (1) bantuan langsung kepada keluarga sasaran, dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), bantuan langsung dalam bentuk barang seperti pembagian beras bagi masyarakat miskin (Bantuan Pangan Non Tunai), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu, dan sebagainya. Bantuan langsung kepada Masyarakat miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya yang berupa pemberian Bantuan Pangan Non Tunai, PKH, KKS dan lain-lain diwujudkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah teknis yang menangani langsung kegiatan tersebut. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Penerima Bantuan Sosial Per Jiwa di Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun 2022

NO	Kecamatan	Program Keluarga Harapan (PKH)	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Penerima Bantuan luran (PBI)
1	Loura	1.323	2.393	17.807
2	Kota Tambolaka	1.742	3.952	27.368
3	Wewewa Utara	1.202	2.722	13.225
4	Wewewa Timur	2.289	3.173	26.134
5	Wewewa Tengah	2.997	4.016	32.236
6	Wewewa Barat	3.335	5.689	39.264
7	Wewewa Selatan	1.752	3.429	23.759
8	Kodi Balaghar	846	1.966	13.400
9	Kodi Bangedo	2.039	2.951	28.621
10	Kodi	2.471	4.032	35.048
11	Kodi Utara	2.471	4.032	35.048
TOTAL PENERIMA BANTUAN		23.949	40.425	308.978

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022



- (2) Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin berupa pemberian beasiswa bagi siswa miskin. BSM adalah kegiatan pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin. Pada Tahun 2016 BSM untuk siswa/i SMP di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 3.493 siswa. BSM dikendalikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya agar penanganannya dapat lebih intens dan tepat sasaran. Pada tahun 2016 penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SD sebesar 12.867 siswa, tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 26.125 siswa. Penerima PIP di tahun 2018 sebesar 39.354 siswa atau naik sebanyak 13.229 siswa dari tahun 2017. Sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan penerimaan bantuan PIP tingkat SD yaitu sebesar 34.289 atau menurun sebanyak 5.065 siswa (Dinas Pdan K Kab.SBD tahun 2020). Bantuan Program Indonesia Pintar tingkat SMP di tahun 2017 sebesar 12.636 siswa, sedangkan tahun 2018 penerima bantuan PIP sebesar 9.796 siswa. Pada tahun 2019 penerima bantuan PIP sebesar 8.916 siswa.
- (3) bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa layanan jaminan kesehatan (jamkesmas) bagi masyarakat miskin. Di Kabupaten Sumba Barat Daya Program Jamkesda (2018) dari APBD II sebanyak 33.243 jiwa sedangkan yang di backup APBN kuotanya 251.650 jiwa jadi total masyarakat yang sudah masuk program JKN adalah sebesar 299.162 jiwa.

Kelompok 2: Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Kelompok 3: Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil yaitu:

- ❖ Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga telah melakukan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan pemberian KUBE bagi kabupaten tertinggal Tahun 2018 yaitu ke 50 kelompok.
- ❖ Kegiatan pembangunan pasar rakyat. Kegiatan pembangunan pasar rakyat adalah sarana dan prasarana yang berbasis pengembangan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat. Pengendalian kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba



Barat Daya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, usaha mikro dan kecil dapat berkembang.

- ❖ Kegiatan Industri makanan dan minuman. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan akses bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan dan menguatkan perekonomiannya.

Kelompok 4: Kelompok program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial

Kelompok program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sehingga angkatan kerja yang ada dapat terserap oleh lapangan kerja, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang miskin dan rentan.

3.3 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 dengan pelaksanaan SKPD pelaksana program dan kegiatan sebagai berikut :

❖ Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

Adapun pelaksanaan program reguler daerah Tahun 2021 yang mendukung tercapainya upaya penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan
 - Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program pengawasan obat dan makanan.
 - Program pengembangan obat asli Indonesia
 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
 - Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak.
2. Bidang Pendidikan
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
 - Program Pendidikan Menengah
 - Program Pendidikan Non Formal
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



3. Bidang Sosial

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, Dan Pemandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - Kegiatan Operasional Penyediaan dan Pendampingan UPP/PKH
 - Kegiatan Pegangkutan Barang Bantuan Bencana
 - Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Masyarakat Kat dan PMKS Lainnya
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Sosial dan bantuan permakanan bagi lanjut usia miskin
- Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma
 - Kegiatan Bimbingan Permakanan Bagi Penandang Cacat
- Program Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Non Tunai
 - Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) san Bantuan Pangan Non Tunai dan seterusnya

4. Rumah Layak Huni (RLH)

Kegiatan rumah layak huni merupakan program pemerintah yang langsung tertuju pada obyek yang menjadi indikator dalam kemiskinan. Kegiatan utamanya adalah merehabilitasi atau membangun rumah yang belum layak huni menjadi rumah yang sudah layak untuk dihuni. Penurunan jumlah masyarakat miskin yang memiliki rumah berdinding kayu atau semi permanen, berarti mengurangi jumlah indikator tingkat kemiskinan seseorang dan itu juga berarti membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan akan kebutuhan dasar.



BAB IV

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



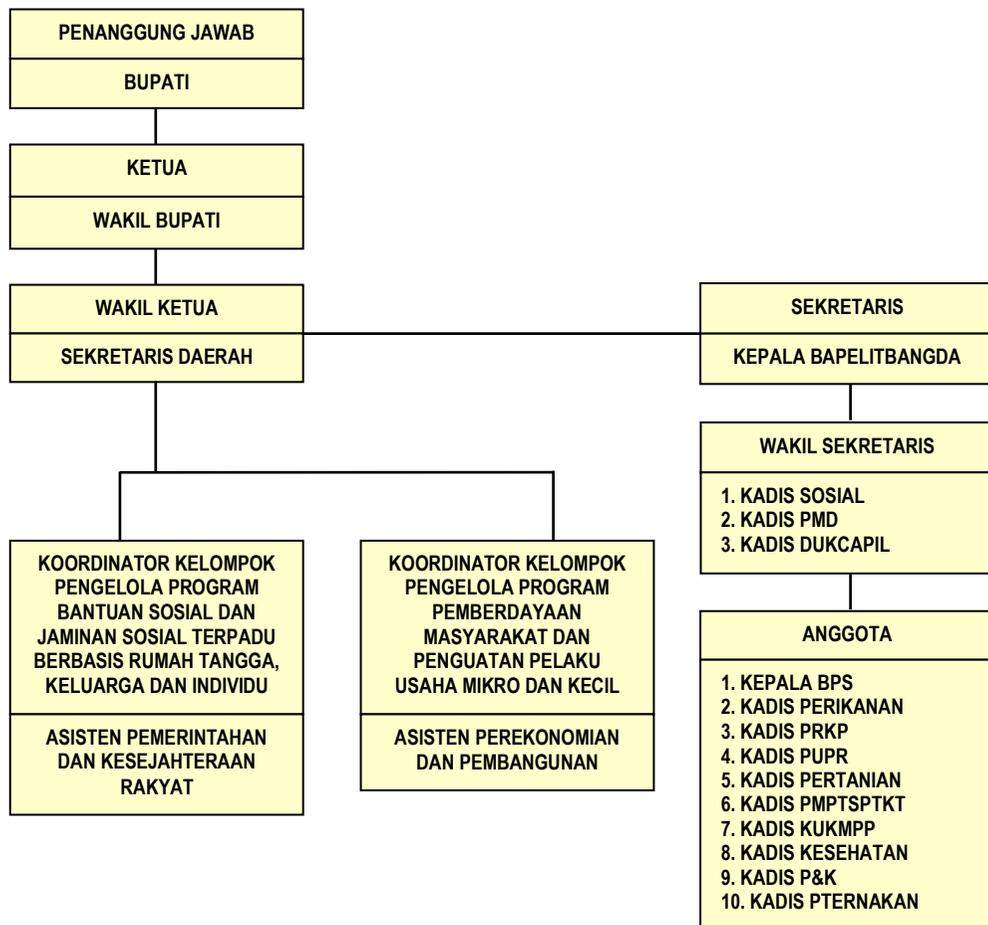
4. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1 Kelembagaan TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sumba Barat Daya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Ketua TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Wakil Bupati dan Sekretarisnya adalah Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya serta keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan (selengkapnya lihat gambar 4.1).

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

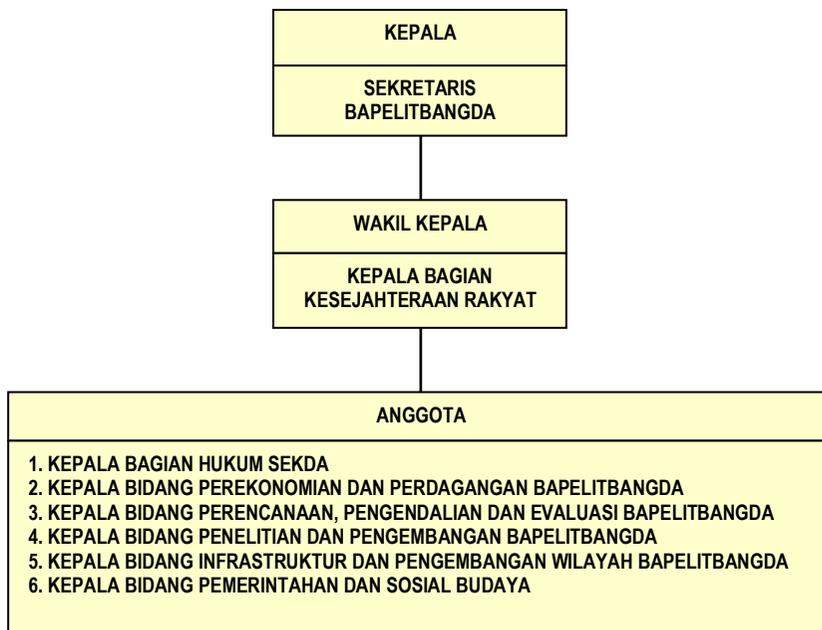


Sumber : Sesuai SK Bupati Sumba Barat Daya, 2022



Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPKD Bupati Sumba Barat Daya juga membentuk tim sekretariat TKPKD yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD. Tim sekretariat ini berkedudukan di Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya yang bertanggungjawab kepada ketua TKPKD dan struktur organisasi tim sekretariat seperti terlihat pada gambar 4.2 di bawah ini.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi
Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya



Sumber : Sesuai SK Bupati Sumba Barat Daya, 2022

Salah satu fungsi TKPKD dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan kegiatan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD terkait. Dalam kendali TKPKD, pemantauan yang dilakukan oleh SKPD terkait diharapkan dapat diperoleh secara berkala informasi tentang kinerja realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap program. Dengan demikian TKPKD dapat berperan membantu perbaikan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Di samping itu, hasil pemantauan dapat berguna bagi daerah yang bersangkutan dalam menentukan intervensi kebijakan daerah untuk mendukung efektivitas program yang sedang berjalan.



Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Bupati Sumba Barat Daya pada tanggal 07 April Tahun 2021 telah mengeluarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 176/KEP/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021. Melalui Surat Keputusan Bupati tersebut, maka Tim yang dibentuk diberi amanat untuk melakukan tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- b) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Penetapan tentang tugas dan fungsi TKPKD pada keputusan Bupati Sumba Barat Daya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2020 dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
- b. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
- c. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun;
- d. Rencana Aksi Tahunan (RAT) adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun;
- e. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
- f. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- g. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- i. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPK) adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi;
- j. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk



- penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota;
- k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - l. Gubernur bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah provinsi;
 - m. Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten/Kota.

Tim Sekretariat TKPK Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai tugas:

1. Memberikan dukungan administrasi teknis;
2. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
3. Menyiapkan bahan RPKD, Rencana aksi, agenda tahunan; dan
4. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Sumba Barat Daya.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya, dibentuk Kelompok Pengelola Program yaitu :

- a. Kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu yang melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dengan struktur dan kedudukan seperti terlihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1

Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga Dan Individu

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya	Ketua
2.	Kadis Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya	Sekretaris
3.	Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota
4.	Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota
5.	Kadis Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat	Anggota



NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Daya	
6.	Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota
7.	Kasubid Infrastruktur pada Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota
8.	Staf pada Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota

- b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan struktur dan kedudukan seperti terlihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan
Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya	Ketua
2.	Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya	Sekretaris
3.	Kadis Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota
4.	Kadis Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota
5.	Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota



NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi pada Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota
7.	Staf pada Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota
8.	Staf pada Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota
9.	Staf pada Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota

4.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, maka sangat membutuhkan adanya keterpaduan dan sinergitas antar stakeholder yang terlibat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Keterpaduan dan sinergitas ini akan terwujud bila terdapat koordinasi yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itulah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang juga merupakan bagian dari pada kesepakatan MDGs tahun 2000, maka penanggulangan kemiskinan mulai menjadi bagian dari kebijakan dan program pembangunan nasional maupun daerah. Namun pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar lebih terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, maka baru tahun 2010 dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 15 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota, di tingkat pusat dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan di tingkat daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (TKPKD).

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam bekerja juga dilakukan pembinaan kelembagaan dan pembinaan sumber daya manusia yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Tim ini memiliki fungsi dan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawalan dan pemantauan serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah disebut Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).



4.2.1 Koordinasi di Tingkat Daerah

Sebagaimana Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 176/KEP/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021, TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan yang mempunyai fungsi sebagaimana telah diuraikan dibagian kelembagaan sebelumnya. Koordinasi yang dilakukan meliputi koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan penyusunan rencana kerja baik dalam jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun rencana kerja jangka pendek (RKPD).

Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah dilakukan antara lain :

- a. Melakukan koordinasi antara SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berperan langsung dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui berbagai kebijakan dan Peraturan Daerah yang melindungi hak-hak masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik yang murah, cepat dan bermutu, melakukan fasilitasi dan mediasi, mendorong kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang bertugas mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten, menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas pelaku (stakeholders).
- c. Kerjasama dengan instansi vertikal yaitu BPS dalam penyediaan data kemiskinan dan Statistik Pembangunan Daerah;
- d. Kerjasama dengan LIPI dalam melakukan kajian, advokasi, pendampingan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah dan kerjasama penelitian untuk melakukan kajian yang berhubungan dengan upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- e. Kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah (LSM lokal dan LSM Internasional), dalam rangka penguatan dan pemberdayaan masyarakat miskin yaitu :
 - Kerja sama tahunan (RKT) dengan Handicap International (Jerman) dari tahun 2018-2020 melalui program peningkatan ekonomi inklusif
 - Kerjasama Pemerintah Sumba Barat Daya dengan Sumba *Hospitality Foundation*.



- f. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT. Askes Cabang Sumba Barat Daya dan RS swasta, puskesmas terkait BPJS Kesehatan, memberikan jaminan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat .

4.2.2 Koordinasi Tingkat Pusat

TKPK daerah merupakan kepanjangan tangan dari TNP2K, yang diharapkan terjalin adanya koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan untuk segera dibentuk TKPK Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Untuk itulah Kementerian Dalam Negeri menetapkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan kebijakan diatas, TKPK Daerah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai mitra kerja TNP2K yang bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh TNP2K.

4.2.3 Rapat Koordinasi TKPKD Tingkat Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya

Rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur terlaksana pada Selasa, 18 Oktober 2022 di Kota Kupang sebagai berikut :

Tanggal	NARA SUMBER	JUDUL MATERI	KETERANGAN
18 Oktober 2022	Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres RI Sekretaris Eksekutif TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (TNP2K)	UPAYA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	Rapat Koordinasi di hadiri para ketua dan pengurus TKPKD se Provinsi NTT dan stakeholder terkait secara daring dan luring baik pemateri dan para peserta rapat.
	Wahyu Suharto Kasubdit Sosial dan Budaya Ditjen Bina Bangsa Kemendagri	MERANCANG UPAYA KONVERGENSI DALAM UPAYA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	
	Wakil Gubernur Provinsi NTT(Diwakili oleh Sekretaris TKPKD Provinsi NTT/Kepala Bapelitbangda Prov. NTT)	OPTIMALISASI PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	
	Johny Army Konay, SH Wakil Bupati Timor Tengah Selatan	Best Practice Implementasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem 2021 – 2022 dan Persiapan Tahun 2023 di Kabupaten Timor Tengah Selatan	



Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan dan Komitmen Bersama sebagai berikut:



WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DAN KOMITMEN BERSAMA
DALAM RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
EKSTREM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua puluh Dua, telah dilakukan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dihadiri oleh para pihak sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta pada lampiran berita acara ini.

Dalam Rapat Koordinasi ini, para pihak menyatakan kesepakatan dan komitmen sebagai berikut:

1. Penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pendekatan partisipatif, inovatif dan kolaboratif secara multi-sektor dan multi-level, baik antar tingkat pemerintahan maupun juga antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten/Kota sebagai unsure strategis dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 (tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota).
3. Penggunaan satu data sasaran dalam implementasi kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) secara akurat dan obyektif berdasarkan nama dan alamat, karakteristik sosial dan ekonomi.
4. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten/Kota yang inklusif paling lambat diselesaikan pada tanggal 01 November 2022 sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota wajib membuat Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten/Kota Tahun 2023 paling lambat tanggal 10 Januari 2023.

Demikian, Berita acara hasil kesepakatan dan komitmen ini dibuat untuk dipergunakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 18 Oktober 2022

Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Timur
Sebagai Ketua TKPK

Drs. Josefa Andriatna, MM



Foto-foto kegiatan rakor kemiskinan

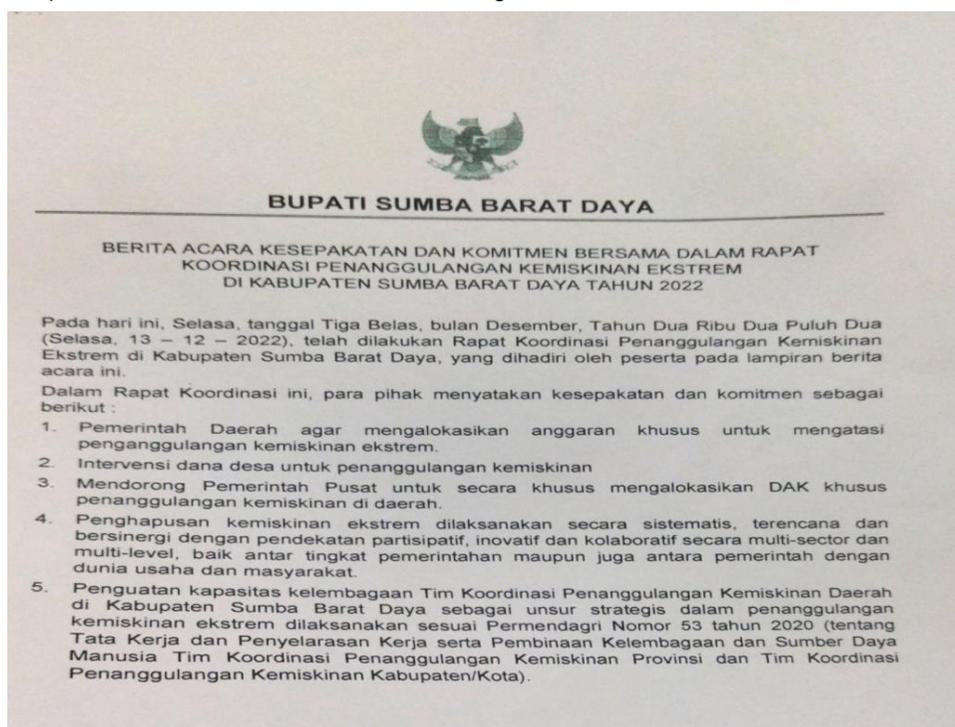




Sedangkan rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan pada Selasa, 13 Desember 2022 di Aula Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

Tanggal	NARA SUMBER	JUDUL MATERI	KETERANGAN
13 Desember 2022	Marthen Cristian Taka, S.IP Wakil Bupati Sumba Barat Daya (Ketua TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya)	CAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2021 DAN UPAYA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN ESKTREM TAHUN 2023 DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	Rapat Koordinasi di hadirinya ketua dan pengurus TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya.
	Samuel Boro, ST Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat Daya (Sekretaris TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya)	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA "PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENURUNAN KESEJAJARAN, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN"	

Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan dan Komitmen Bersama sebagai berikut:





6. Penggunaan satu data sasaran dalam implementasi kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) secara akurat dan obyektif berdasarkan nama dan alamat, karakteristik sosial dan ekonomi.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sumba Barat Daya wajib membuat Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022.

Demikian, Berita acara hasil kesepakatan dan komitmen ini dibuat untuk dipergunakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Tambolaka, 13 Desember 2022

Wakil Bupati Sumba Barat Daya

SB Selaku Ketua TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya, *MU*


Marthen Cristian Taka, S.IP

Foto-foto kegiatan rakor kemiskinan





4.3 Permasalahan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya telah berjalan bertahun-tahun dengan baik dan lancar. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi masih klasik, seperti koordinasi yang kurang intensif, terpadu, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan, serta kurangnya evaluasi yang menyeluruh, target sasaran yang kurang mengena/tepat, angka kemiskinan dan realita yang berbeda serta belum mencukupinya ketersediaan anggaran yang menopang program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Secara khusus mengenai permasalahan dalam koordinasi, tidak menemui hambatan berarti. Apabila suatu Program Penanggulangan Kemiskinan kurang dikoordinasikan secara intensif, hal ini umumnya karena informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut belum turun atau terlambat, sehingga dalam pelaksanaannya menemui kendala. Koordinasi juga memerlukan upaya lanjutan yaitu *check* dan *recheck* kondisi di lapangan, sehingga apa yang digambarkan di belakang meja apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam membangun daerah menjadi titik sentral dan menjadi sangat besar, karena daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri. Ini merupakan perubahan besar dalam sejarah tata pemerintahan. Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada saat diberlakukannya UU No.



22/Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah (Otonomi Daerah), yang menimbulkan berbagai perbedaan persepsi tentang kebijakan pembangunan dan pola penanggulangan kemiskinan.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dan derasnya arus pemikiran baru yang berkembang dalam jargon-jargon reformasi telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, oleh karenanya TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pengurangan tingkat kemiskinan.

Adapun aktifitas yang menyangkut peran dan fungsi TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini belum optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya peran dan fungsi TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan antara lain :

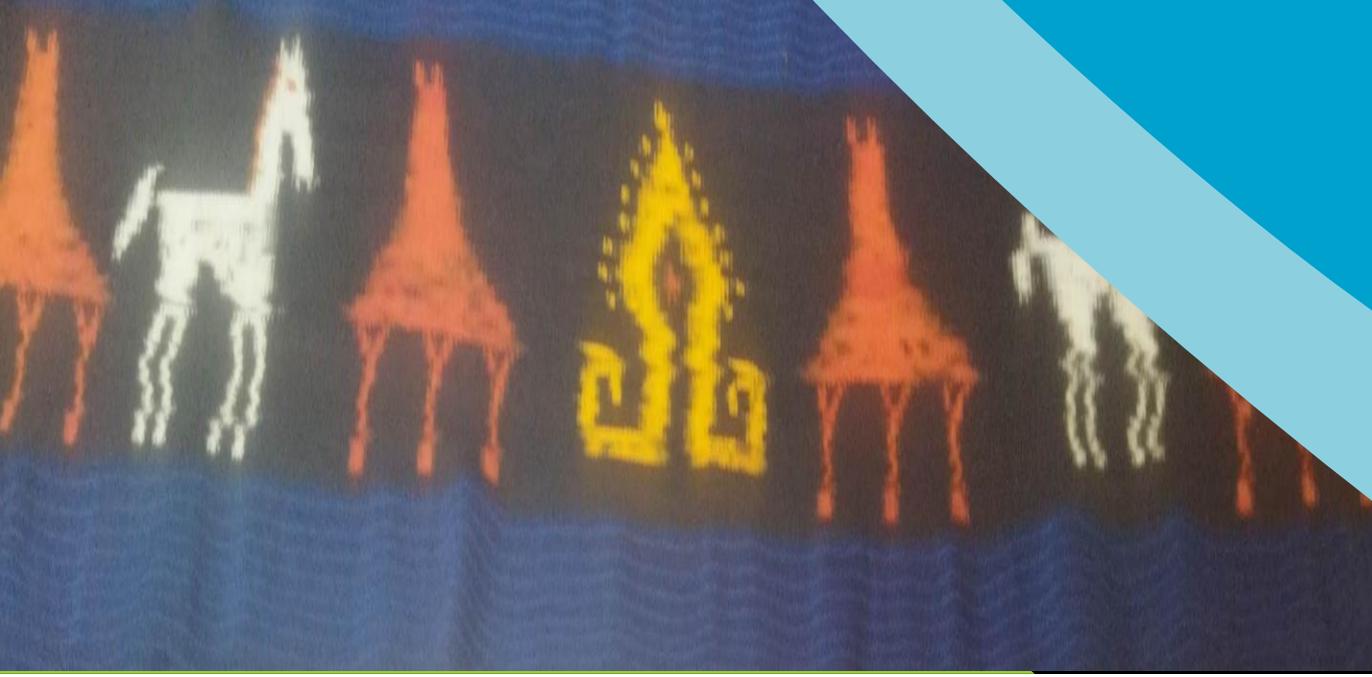
- a. Masih kurangnya pemahaman tentang TKPKD.
- b. Belum adanya program kerja TKPKD
- c. Rendahnya daya dukung operasional TKPKD
- d. Sarana dan Prasarana pendukung (Sekretariat) TKPKD belum ada.

Belum optimalnya peran dan fungsi TKPKD Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini akan berdampak terhadap strategi penanggulangan kemiskinan daerah, dengan demikian sejalan dengan arah dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang akan dirumuskan diharapkan ke depan peran TKPKD dapat :

1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah
2. Menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD)
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.
4. Membuat program unggulan Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu.
5. Koordinasi rutin dan kajian terkait dengan Penanggulangan kemiskinan.
6. Mengawal atau mendorong Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Mendorong *Stakeholders* melalui CSR dalam menanggulangi kemiskinan.

BAB V

KESIMPULAN





5. KESIMPULAN

5.1 Kondisi Umum Daerah

1. Luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya 1.445,32 KM² terdiri atas 11 Kecamatan, 173 Desa dan 2. Kelurahan, dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kodi Utara dengan luas wilayah 243,8 KM² dan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Wewewa Utara dengan luas wilayah 63,26 KM²;
2. Jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 305.689 jiwa, dengan rata – rata kepadatan penduduk 211 jiwa/km
3. Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya bergerak pada sektor pertanian (jagung dan padi).

5.2 Kondisi Kemiskinan Multidimensi

5.2.1 Dimensi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

- Jumlah dan Persentasi Penduduk Miskin
 - a. Garis kemiskinan untuk Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021 sebesar 390.217 rupiah/kapita/tahun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 100.420 jiwa dan angka kemiskinannya 28,18% sedangkan garis kemiskinan untuk Provinsi NTT sebesar 415.116 rupiah/kapita dan angka kemiskinannya 20,44%;
 - b. Capaian program pembangunan penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2021 belum relevan dengan capaian program untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi NTT dan Nasional;
 - c. Tingkat kemiskinan Provinsi NTT untuk Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 sebesar 28% dan capaian di tahun 2021 naik menjadi 28,18%;
 - d. Dalam kurun waktu 2018 – 2021 kebijakan dan program untuk penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya belum berjalan efektif;
 - e. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 sebesar 4,60%. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 masih tergolong tinggi karena berada diatas indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional. Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional pada tahun 2021 sebesar 3,96% hal ini perlu adanya upaya intervensi kebijakan karena semakin tinggi nilai indeks Kedalaman Kemiskinan semakin jauh rata – rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;



- f. Pada tahun 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 1,10% hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,13%. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 berada diatas Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi NTT (1,05%). Tingginya Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya yang sangat besar dan ditambah dengan permasalahan *pandemic Covid-19*.

5.2.2 Dimensi Ketenagakerjaan

- a. Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 2,04% turun 0,32% dibanding dengan tahun 2020 sebesar 2,36% dan berada dibawah TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sebesar 3,77%.
- b. Angkatan Kerja (laki-laki + Perempuan) di Kabupaten Sumba Barat Daya yang bekerja pada tahun 2021 sebanyak 186.595 orang mengalami kenaikan sebanyak 16.391 orang dibanding tahun 2020 yang bekerja sebanyak 170.204 orang sedangkan yang menganggur tahun 2021 sebanyak 3.884 orang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang menganggur sebanyak 4.116 orang.

5.2.3 Dimensi Pendidikan

- a. Angka Melek Huruf
Angka melek huruf penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 mencapai 84,38% dari keseluruhan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 86,30%.
- b. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK
 1. APK SD/MI Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami fluktuasi sejak tahun 2018 – 2021. Pada tahun 2021 APK SD/MI sebesar 117,18%, APK SD/MI mengalami peningkatan sebesar 0,35% dibanding tahun 2020 sebesar 116,83%;
 2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,8% menjadi 85,02% dibandingkan tahun 2020 sebesar 84,22%.
 3. Angka Partisipasi Kasar SMA /SMK di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 sebesar 83,15% mengalami kenaikan sebesar 4,12% dibandingkan tahun 2020 sebesar 79,03%).
- c. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK
 1. Tahun 2021 APM Kabupaten Sumba Barat Daya pada jenjang SD/MI sebesar 94,71%, hal ini mengalami sedikit penurunan jika



dibandingkan dengan tahun 2020 APM Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 94,85%).

2. Untuk jenjang lanjutan tingkat pertama (SMP/MTS) tahun 2021 APM Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 59,62%, hal ini mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 59,63%.
3. Dan pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas (SMA/SMK) APM Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 sebesar 43,05%, hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020 APM Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 43,86%.

5.2.4 Dimensi Kesehatan

- a. Angka Kematian Ibu Melahirkan
 1. Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 (235/100.000 Kh);
 2. Intervensi kebijakan dan program pemerintahan yang mengarah pada pengurangan Angka Kematian Ibu Melahirkan belum berjalan efektif;
 3. Dalam kurun waktu tahun 2020 – 2021 upaya capaian penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Sumba Barat Daya belum mendukung tujuan Provinsi dan Nasional.
- b. Prevelensi Balita Gizi Buruk
 1. Prevelensi balita gizi buruk pada tahun 2021 sebesar 575 balita.
 2. Dibandingkan dengan tahun 2020 (1.016 balita), balita dengan gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 441 balita
 3. Intervensi program dan kegiatan untuk mengurangi kasus balita gizi buruk menunjukkan adanya perbaikan pada tahun 2021.
- c. Angka kematian bayi
 1. Angka kematian bayi Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2021 sebesar 5,53/1.000 kh;
 2. Intervensi kebijakan untuk menurunkan angka kematian balita tahun 2018-2021 belum berjalan efektif serta belum mendukung tujuan provinsi maupun nasional.

2. Dimensi Prasarana Dasar

a. Presentasi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak

Pada tahun 2021 Kabupaten Sumba Barat Daya adalah kabupaten dengan persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak terendah dari 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur baru mencapai 42,15% sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Flores Timur mencapai 93,06% dan masih tertinggal jauh dari capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang persentase penduduk yang memiliki



akses sanitasi layak mencapai 73,36%. Pembangunan program pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada penyediaan sanitasi layak terbesar di Kecamatan Kodi Utara dan terendah di Kecamatan Wewewa Timur.

b. Persentase Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak.

1. Pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 82,75% naik cukup signifikan dibanding tahun 2020 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak baru mencapai 67,38%.
2. Intervensi program untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak berjalan efektif dan berdampak luas terhadap pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya.

c. Presentase Rumah Tangga Dengan Akses Listrik

Di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 berdasarkan sumber penerangan rumah tangga (Listrik PLN, Listrik Non PLN dan Bukan Listrik) persentase rumah tangga dengan akses listrik PLN mencapai 51,55% Listrik Non PLN 24,31% dan bukan listrik 24,14%.

d. Proporsi Akses Jalan R4 Sepanjang Tahun

1. Panjang jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 adalah 1.136,30 km. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun 2021 mencapai 0,64 atau 732,14 km mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 jalan dalam kondisi baik mencapai 0,63 atau 717,14 km dari total panjang jalan kabupaten (1.136,30 km) sesuai SK Bupati Sumba Barat Daya No. 563./KEP/KH/2015.
2. Intervensi program untuk meningkatkan akses jalan dan memperbaiki kerusakan jalan berjalan efektif dan berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan jalan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya.

3. Bidang ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan

- Luas panen hasil pertanian komoditas padi pada tahun 2021 sebesar 27.037 ha, produktivitasnya 3,5 ton per ha dengan jumlah produksi sebanyak 94.630 ton sedangkan luas panen hasil pertanian komoditas jagung sebesar 36.187 ha, produktivitasnya 3,8 ton per ha dengan jumlah produksi sebanyak 137.511 ton.



- Harga rata-rata tertinggi untuk pangan medium di tahun 2021 adalah daging sapi sebesar Rp 150.000/kg sedangkan harga terendahnya yaitu jagung dengan harga rata-rata sebesar Rp 5.000/kg.
- Intervensi program untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Sumba Barat Daya belum berjalan efektif sehingga belum berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya.